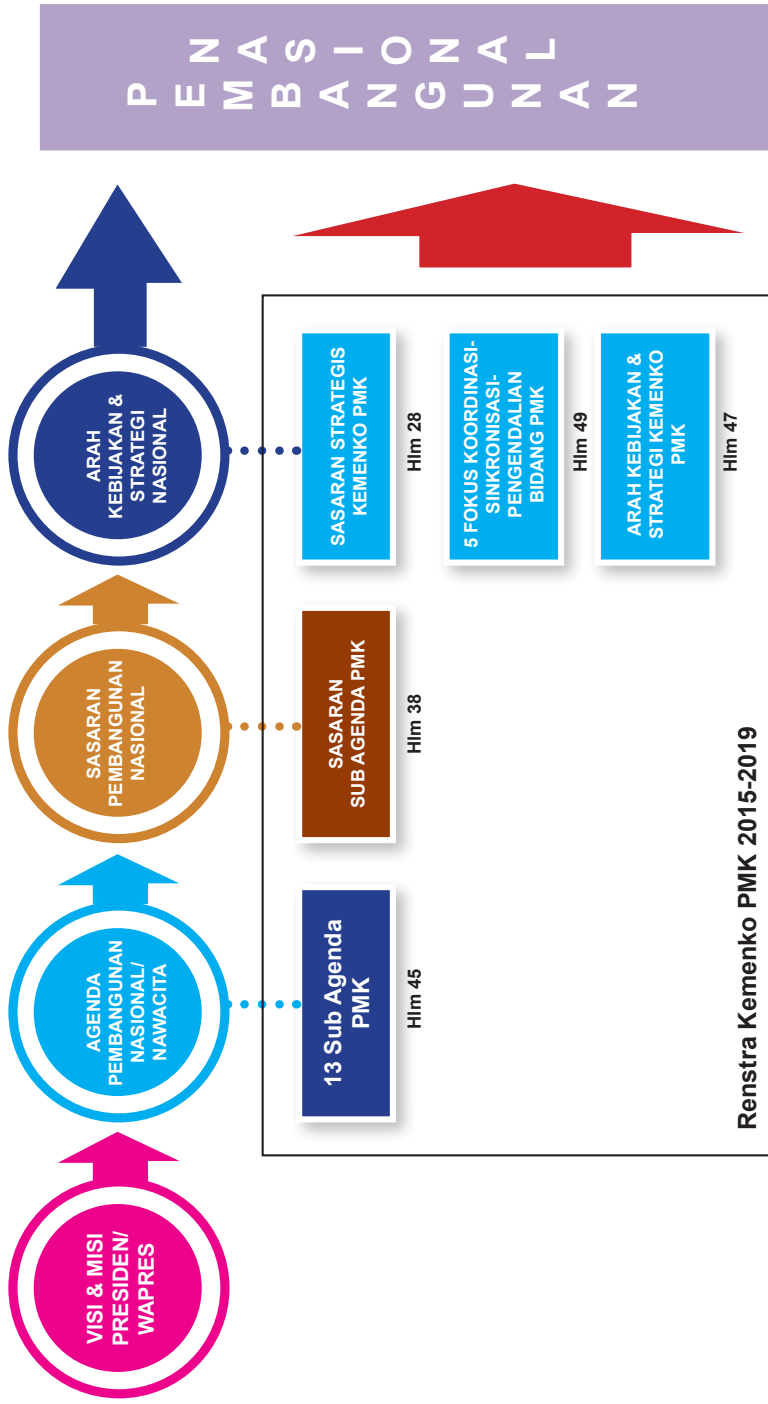


---

*Menjadi Koordinator  
Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan  
untuk Mewujudkan Indonesia  
yang Berdaulat, Mandiri,  
dan Berkepribadian  
berdasarkan Gotong Royong*

---



**Gambar 1** Hubungan Antara Kebijakan Nasional Dengan Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1	Kondisi Umum .....	3
1.1.1	Capaian Nasional periode 2009–2014 .....	3
1.1.2	Capaian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2009-2014 .....	3
1.1.3	Aspirasi Masyarakat Terhadap Peran dan Tusi Organisasi .....	8
1.2	Potensi dan Permasalahan.....	10
1.2.1	Dinamika Lingkungan Internal .....	10
1.2.2	Dinamika Lingkungan Eksternal .....	13
<b>BAB 2</b>	<b>VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKO PMK .....</b>	<b>19</b>
2.1	Visi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .....	21
2.2	Misi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .....	23
2.3	Tujuan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .....	26
2.4	Sasaran Strategis Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .....	27
<b>BAB 3</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>31</b>
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	33
3.1.1	Sasaran Sub Agenda Pembangunan yang terkait dengan PMK .....	38
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK .....	47
3.2.1	Program dan Kegiatan.....	55
3.3	Kerangka Regulasi .....	57
3.4	Kerangka Kelembagaan.....	58
3.4.1	Kebutuhan Tata Laksana .....	59
3.4.2	Kebutuhan Pengelolaan Sumber daya Manusia.....	60
3.4.3	Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi .....	61
<b>BAB 4</b>	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>63</b>
4.1	Target Kinerja.....	65
4.1.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	65
4.1.2	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	65
4.2	Kerangka Pendanaan .....	65
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pilar II Investasi Sumber Daya Manusia, Tahun 2010–2014 .....	5
Tabel 1.2	Perbandingan Substansi Tusi Berdasarkan Perpres .....	11
Tabel 2.1	Keterkaitan Pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019 .....	24
Tabel 2.2	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Kemenko PMK 2015-2019 .....	26
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK .....	28
Tabel 3.1	Sasaran Makro RPJMN 2015-2019 .....	35
Tabel 3.2	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019 .....	35
Tabel 3.3	Tabel Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB .....	39
Tabel 3.4	Tabel Sasaran Pembangunan Pendidikan .....	40
Tabel 3.5	Tabel Sasaran Pembangunan Kesehatan .....	41
Tabel 3.6	Nawacita dan Agenda Pembangunan Kemenko PMK .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Antara Kebijakan Nasional Dengan Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019.....	ii
Gambar 2	Disparitas fasilitas kesehatan antar provinsi di Indonesia.....	14
Gambar 3	Disparitas kekurangan gizi antar provinsi di Indonesia .....	15
Gambar 4	Tahapan RPJPN 2005-2025.....	33
Gambar 5	5 (lima) fokus koordinasi kemenko PMK .....	49
Gambar 6	Hubungan antara program teknis dengan program generik .....	55

## TRISAKTI

3

1. Berdaulat secara politik
2. Mandiri dalam ekonomi
3. Berkepribadian dalam kebudayaan

## FOKUS KOORDINASI

5

1. Keselarasan Basis Data
2. Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Pembangunan Desa Semesta
5. Pembangunan Manusia Berkarakter

3

## TRISAKTI

9

## AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL/NAWACITA

13

## SUB AGENDA PMK

5

## FOKUS KOORDINASI

## AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL/NAWACITA

9

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.

## SUB AGENDA PMK

13

1. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
2. Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris
3. Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal
6. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
7. Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
8. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
9. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
10. Pengelolaan bencana
11. Revolusi karakter bangsa
12. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
13. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama

# TIM PENYUSUN

## PENGARAH

Drs.Sugihartatmo, MPIA  
Willem Rampangilei  
Drs. H. Chazali Husni Situmorang, Apt, M.Sc, P.H  
Dr.dr.H.Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A  
Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A  
Dr.Haswan Yunaz, MM, M.Si  
Ir. Wahnarno Hadi, M.S  
Dolfie, O.F.P  
Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA

## KONTRIBUTOR

Gunarso Djoko Santoso, AK, MM  
Dra. Indah Suwarni, M.Si  
Sudarman,SH  
Ir. Djoko Joewono, M.Si  
Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat  
Meida Octarina, MCN  
Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi  
Suarmansyah, SH  
Drs. Rudoro Susanto E, M.Si  
Ir. Magdalena, M.M

## PENYUSUN

Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB  
Danang A.Ichwan, S.IP  
Nefolina Situmorang, MBA  
Dwidoyo Supangkat,SE  
Heri Nugroho, SE  
Nur Kusmiati, S.Si, M.E  
Heidy Ardhiastari, SE, M.M  
Javan Herdamang Pajrin, SE

## FOTO DAN DOKUMENTASI

Humas Kemenko PMK

## EDITOR, DISAIN GRAFIS & LAYOUT

Setiawati Intan Savitri S.P M.Si  
Gatot Santoso, S.Sos  
Elvira S.Sos

## PENERBIT

Kementerian Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3  
Jakarta Pusat 10110



## KATA PENGANTAR



*Puan Maharani*

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan dan pedoman penganggaran untuk periode 5 (lima) tahun, sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kemenko PMK memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko PMK dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Renstra Kemenko PMK 2015-2019 selanjutnya akan menjadi panduan dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya. Setiap unit kerja di lingkungan Kemenko PMK harus menjabarkannya dalam rencana operasional agar seluruh target yang ada dalam Renstra Kemenko PMK menjadi lebih mudah tercapai.

Akhirnya, atas segala bantuan dan partisipasi segenap pihak dalam penyusunan Renstra Kemenko PMK tahun 2015-2019, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang telah dan akan kita kerjakan dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa, utamanya dalam rangka pembangunan manusia dan kebudayaan.

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

**PUAN MAHARANI**





**BAB**

**1**

**3**

**9**

**13**

**5**

## **BAB I** PENDAHULUAN

*1.1 KONDISI UMUM*

*1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN*





## 1.1 Kondisi Umum

### 1.1.1 Capaian Nasional periode 2009–2014

Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Perwujudan visi tersebut, salah satunya ditandai dengan meningkatnya daya saing bangsa Indonesia.

Pembangunan Nasional telah memberikan kemajuan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 persen, meningkat dari tahun 2009 sebesar 4,6 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini diikuti dengan inflasi yang rendah, suku bunga yang stabil, dan nilai tukar menguat dengan volatilitas terjaga.

Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan pendapatan per kapita yang pada tahun 2008 sebesar US\$ 2.271,2 meningkat menjadi US\$ 4.000 pada tahun 2014. *Human Development Index* (HDI) Indonesia, meningkat dari 0,726 pada tahun 2009, menjadi 0,732 pada tahun 2013, yang berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bangsa Indonesia telah membaik. Dengan pendekatan *pro growth*, *pro poor*, *pro job*, dan *pro environment* angka kemiskinan

serta pengangguran cenderung menurun setiap tahunnya. Jika pada tahun 2009 tingkat kemiskinan 16,7 persen, maka pada tahun 2013 turun menjadi 11,96 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebesar 8,1 persen, dan menurun pada tahun 2014 sebesar 5,62 persen.

Untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata melalui perbaikan kesehatan ibu dan anak, maka perbaikan gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit terus diperbaiki. Hal ini ditunjukkan dengan angka kematian bayi kelahiran hidup (2009) menjadi kelahiran hidup (2014). Namun demikian, angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi, dimana angka kematian ibu melahirkan 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun (2007) melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (2012) berdasarkan SDKI 2012. Berdasarkan data dimaksud, masih jauh dari target MDG's yaitu 100 per 100.000 kelahiran di tahun 2015.

### 1.1.2 Capaian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2009-2014

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) memperoleh mandat membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Kemenko Kesra melaksanakan - koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk sinergi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan kedalam 3 pilar

utama yakni: a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; b. Pengembangan investasi sumber daya manusia (SDM) dan Kemasyarakatan, c. Penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat.

#### a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Program penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan nasional absolut dari 14,1 persen pada tahun 2009 menjadi 8–10 persen pada tahun 2014, sekaligus diiringi dengan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Adapun program-program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran diantaranya adalah beras miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM dengan berbagai sasaran dan klasifikasi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selama periode 2010–2014, capaian penurunan kemiskinan mengalami fluktuasi dan berjalan lamban. Penurunan di atas satu persen, yakni 1,17% terjadi pada 2009 ke 2010. Kemudian prosentase penurunan tersebut berkurang dari satu persen pada tiga periode tahun berikutnya, yakni pada angka 0,84% pada tahun 2011, 0,84% pada tahun 2012, dan 0,19% pada tahun 2013.

Meskipun *trend* jumlah penduduk miskin terus menurun, dan ini mengandung arti target penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran cukup berjalan, namun masih bisa dikategorikan lambat. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh berbagai hal terkait perkembangan ekonomi makro pada periode tersebut.

Secara umum, hasil analisis data dari BPS menyatakan, bahwa tingkat kemiskinan pada periode 2009 hingga Maret 2014 mengalami penurunan, kecuali pada September 2013 mengalami kenaikan dari jumlah maupun persentasenya dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga barang pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, setelah periode tersebut, jumlah penduduk miskin kembali turun. Hingga Maret 2014 jumlah penduduk miskin tercatat hanya 28,28 juta orang, atau 11,25 persen dari total penduduk. Dalam enam bulan terakhir, jumlah penduduk miskin sudah berkurang 320.000 orang.

#### b. Pengembangan Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemasyarakatan

Pengembangan dan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemasyarakatan adalah pilar kedua yang sangat *urgent* bagi keseluruhan pembangunan Indonesia. Realisasi investasi Sumber Daya Manusia berdasarkan sasaran strategis pilar II ditunjukkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pilar II Investasi Sumber Daya Manusia, Tahun 2010–2014**

Sasaran Strategis	Tahun	Target	Realisasi
Pengembangan Investasi SDM dan Masyarakat	2009-2010	Meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,27	72,27
	2010-2011	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,77	72,77
	2011-2012	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar: 73,1	73,29
	2012-2013	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,60	73,79

Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pada program peningkatan IPM yang diupayakan dengan program bidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan penekanan program pada sasaran penurunan tingkat Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), koordinasi penanggulangan penyakit *degenerative*, dan *cardiovaskular* melalui kampanye hidup sehat-seimbang.

Selama periode RPJM 2 atau 2010–2014, peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional meningkat sebesar 0,5 persen. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai daerah di Indonesia cenderung membaik pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Demikian hasil evaluasi awal yang dilakukan

oleh program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) melalui proyek Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi (PGSP), Pemerintah Indonesia, dan Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ).

Berdasarkan lokasi daerah perkotaan atau perdesaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah di daerah-daerah, khususnya di luar Jawa, Sumatra, dan Bali. Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatra, Jawa, dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72,77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatra, dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya dibawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, daerah tertinggal seperti NTT, NTB, dan Papua juga mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.

### c. Penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat

Awal tahun 2010, Kemenko Kesra melakukan sinkronisasi pelaksanaan amanat UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana setiap pemerintah daerah agar membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebagai hasil sinkronisasi oleh Kemenko Kesra, maka pada tahun 2010 jumlah BPBD yang terbentuk meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 120 (Pemkab/Pemkot) dan 32 Pemprov menjadi 341 BPBD di tingkat Kab/Kota dan 32 BPBD di tingkat provinsi.

Pada tahun 2010 pula, telah dipasang total 12 *buoy*. Dengan beroperasi dan berkesinambungannya Indonesia-Technology *Early Warning System* (Ina-TEWS) tersebut, maka masyarakat akan terlindungi dari ancaman tsunami karena adanya peringatan dini dan munculnya kesiapsiagaan sebagai langkah antisipasi.

Program Nasional Penanggulangan Kerawanan Sosial (PNPKS) baru dapat dilakukan penyusunan draf PNPKS melalui rapat koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Negara, LSM, dan perguruan tinggi yang terkait kerawanan sosial.

Penanganan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah (TKIB) dan Warga Negara Indonesia *Overstayers* (WNIO) (jumlah TKI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia) melalui Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat No. 06/Kep/Menko/Kesra tentang Satuan Tugas Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah serta pekerja migran Indonesia bermasalah sosial dan keluarganya dari Malaysia dan negara lainnya, telah membantu permasalahan TKIB dan WNIO

dan berhasil memulangkan mereka dengan bermartabat, dengan jumlah capaian kinerja 100%. Pemulangan WNIO dari Jeddah tahun 2013 pada masa amnesti menggunakan *empty flight haji Garuda Indonesia*, yang berjumlah 714 orang, diantaranya 458 perempuan dan 100 anak.

Pada tahun 2011, kepercayaan setingkat ASEAN terbukti dengan beroperasinya ASEAN *Coordinating Center For Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA CENTER)* dan Indonesia dipercaya sebagai ketua setingkat ASEAN.

Pada tahun 2013 target yang ditetapkan adalah terkelolanya tindakan tanggap cepat pada setiap kejadian bencana nasional dengan target 100 persen. Beberapa target telah tercapai untuk sasaran strategis penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat, salah satunya diukur dari realisasi berkurangnya jumlah *hot spot* di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi sebesar 19,353 titik.

Keseluruhan pencapaian ketiga pilar program tersebut telah dilaksanakan dengan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan. Keseluruhan pencapaian-pencapaian pada ketiga pilar tersebut hakekatnya dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai lini. Koordinasi dan sinkronisasi yang dimaksud adalah koordinasi di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial, perlindungan sosial dan perumahan rakyat, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan dan agama, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

**Koordinasi dan sinkronisasi di bidang koordinasi lingkungan hidup dan kerawanan sosial** telah tersusun beberapa kebijakan.

Kemenko Kesra telah menyelesaikan Dokumen Prosedur Operasi Standar Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (POSNAS KARHUTLA) sebagai upaya konkrit mencegah terjadinya kabut asap yang sering mengganggu hubungan antar negara.

**Koordinasi, dan sinkronisasi di bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan** Rakyat meliputi; program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), program jaminan sosial, program penyandang cacat dan disabilitas lansia, serta program perumahan rakyat. Program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,5% dari kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan komplementer dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu program prioritas telah dilaksanakan pada tahun 2014, melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia dengan diresmikannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

**Koordinasi dan sinkronisasi di bidang kesehatan**, telah diterbitkan Peraturan Presiden tentang komisi penanggulangan nasional HIV/AIDS, Komisi Nasional *Zoonosis*, Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan, percepatan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi, *grand design* kependudukan dan ketenagaan kesehatan. Kemudian keputusan Menteri Koordinator bidang Kesra tentang jejaring pangan terpadu, *center communication forum* (CCF), tim rencana aksi kesehatan dan lingkungan, tim teknis gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

**Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pendidikan dan Agama** dilakukan untuk mewujudkan suatu keterpaduan dalam

penyelenggaraan, pelaksanaan pengembangan dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan dan agama. Sebagai realisasinya Kemenko Kesra telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.15/Kep/Menko/Kesra/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang adanya Pembentukan Forum Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (Forkonas PUS). Kemenko Kesra juga melakukan program konkrit Gerakan Nasional percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun seperti menyediakan beasiswa siswa miskin, BOS dan *block grant* sesuai kebutuhan sekolah.

**Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga** menyelenggarakan kegiatan Sail yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 2009 di Bunaken Sulawesi Utara, Pekan Produk Kreatif Indonesia, Penganugerahan Puncak Budaya Kreatif (Baksyacaraka), Pengelolaan Delapan Warisan Budaya dan Alam Dunia, serta 6 warisan budaya yang masuk Daftar Representatif Budaya dan Benda Warisan Manusia UNESCO. Di bidang olahraga Kemenko Kesra juga berhasil mengoordinasikan penyelenggaraan SEA Games 2011, PON 2012, dan *Islamic Solidarity Games* 2013. Sedangkan di bidang pemuda adalah pelaksanaan Raimuna Nasional 2013 Gerakan Pramuka, pengembangan taman rekreasi Wiladatika Cibubur.

**Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak** ditandai dengan terbitnya Permenkokesra Nomor 01 Tahun 2013 tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan Permenkokesra Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan

dan Penanganan Pornografi. Selain itu, kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan antara lain Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berturut-turut sebesar 99,81% dan 105,69% pada tahun 2013, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 98,44%. Kemenko Kesra telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Anak pada tahun 2013 dengan mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).

**Koordinasi dan sinkronisasi di bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat** penerbitan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan lahirnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berhasil diakui dunia sebagai program yang paling efektif dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sosial (UNDP). Penyaluran KUR selama lima tahun (2009–2014) cukup besar, dimana realisasi nilai KUR mendekati Rp. 47 triliun dengan penerima kredit sebanyak 98 juta orang.

### 1.1.3 Aspirasi Masyarakat Terhadap Peran dan Tusi Organisasi

Pencapaian pembangunan selama periode tahun 2010-2014 menjadi modal penting untuk memantapkan pembangunan Indonesia

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Hal ini sesuai dengan amanat RPJP dalam Undang-Undang tahun 2007 untuk RPJMN 2015-2019.

Kesejahteraan rakyat mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kualitas manusia sangat ditentukan antara lain terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti; pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan lingkungan.

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk mengembangkan daya kemampuan Indonesia agar hidup sehat dan berumur panjang, berilmu pengetahuan, kreatif, memiliki akses terhadap sumber daya untuk hidup layak, serta berperan aktif dalam penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan dan pilihan hidupnya.

Secara keseluruhan upaya Kantor Kemenko dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, pengembangan investasi, Sumber Daya Manusia (SDM), serta kemasyarakatan, dan penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat menuai banyak kemajuan. Namun, masih terdapat beberapa ruang yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan perbaikan terhadap mutu kesejahteraan rakyat.

Kondisi perekonomian secara makro mempengaruhi upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sehingga di masa yang akan datang program-program penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran baik yang



memiliki perspektif pemberdayaan seperti PNPM, PKH, KUR dan juga program dengan pendekatan bantuan langsung seperti; BSM BLM, Raskin hendaknya diiringi dengan upaya-upaya pengendalian inflasi, harga-harga bahan makanan pokok yang mempengaruhi secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan kebutuhan akan adanya penyesuaian yang harmoni antar Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam hal ini peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dari Tugas dan Fungsi (Tusi) Kemenko dimasa mendatang perlu diimplementasikan secara kokoh dan maksimal.

Pada segi-segi penguatan kapasitas dan kualitas pembangunan manusia terdapat beberapa capaian IPM yang secara faktual kurang berimbang antar daerah. Berdasarkan data capaian IPM terdapat daerah-daerah yang berada dibawah rata-rata nasional. Dengan demikian peningkatan IPM sebaiknya dikonsentrasikan di daerah-daerah yang nilai IPM-nya lebih rendah dari rata-rata nasional yakni: Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Peningkatan IPM yang mengalami kemajuan pesat di daerah tertinggal merupakan pertanda bahwa program-program peningkatan kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan akses ekonomi berjalan cukup baik.

Beberapa pelaksanaan program penguatan kesejahteraan masyarakat terganggu dengan kurang sadarnya masyarakat sendiri dalam menjaga kepentingan bersama. Secara faktual pembangunan penanganan pencegahan bencana mendapat gangguan karena kurang sadarnya masyarakat terhadap pemeliharaan barang publik. Beberapa contoh menunjukkan terdapat kegiatan perusakan/pencurian sensor-sensor tsunami yang sejatinya diperlukan oleh masyarakat sendiri. Fakta tersebut memberikan

gambaran perlunya sinkronisasi yakni kebijakan antar lembaga untuk penguatan operasional yang melibatkan BMKG, BPPT dan Bakosurtanal sebagai penanggung jawab. Secara keseluruhan terdapat kebutuhan bahwa peningkatan mutu manusia tidaklah dapat dilepaskan dari konteks perbaikan lingkungan dan penguatan nilai-nilai dalam bentuk kebudayaan yang menunjang kemajuan perilaku bangsa secara keseluruhan. Pembangunan masyarakat secara keseluruhan menciptakan mutu manusia sebagai penggerak (penarik) pembangunan dan kebudayaan yang memfasilitasi lahirnya lingkungan yang baik.

Selain kedua isu-isu kelembagaan tersebut, maka pencapaian Visi Misi dan Tujuan Lembaga tidak dapat dilepaskan oleh efektifitas lembaga dalam memfasilitasi K/L yang menjadi mitra. Kemenko adalah kementerian yang memiliki tugas utama menyelaraskan pelaksanaan pembangunan yang dimandatkan oleh Presiden dan harus ditopang oleh kapasitas lembaga yang tercermin dari 3 unsur utama organisasi yaitu Sumberdaya Manusia (SDM), Kelembagaan, dan Manajemen.

Peran SDM dalam melaksanakan kewenangan Kemenko memfasilitasi pembangunan akan lebih efektif dan produktif jika ditopang oleh kinerja manajemen dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang tinggi. SDM yang kompeten dan ditunjang oleh manajemen sumberdaya serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang baik sebagai organisasi publik akan berkontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Berdasarkan harapan dan aspirasi yang berkembang selama periode 5 tahun sebelumnya, setidaknya terdapat 3 isu strategis yang perlu terus diperkuat dan dikembangkan

dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019), yaitu:

- a. Peningkatan mutu peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada upaya-upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat baik pada segi-segi sumberdaya manusia maupun lingkungan dan kebudayaannya;
- b. Peningkatan mutu manusia, lingkungan dan kebudayaan yang akan menjadi sasaran pembangunan sekaligus subyek para pelaku penghela pembangunan;
- c. Peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan dalam mendukung peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada upaya-upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga isu tersebut mencerminkan peran-peran yang akan diperlukan Kemenko pada 5 (lima) tahun ke depan. Peran-peran tersebut memiliki implikasi, bagaimana memperkuat efektivitas pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya pada bidang-bidang yang telah diamankan.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1 Dinamika Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal adalah keseluruhan aspek atau komponen yang berkontribusi terhadap operasionalisasi program atau kegiatan Kemenko. Aspek-aspek tersebut akan memfasilitasi bagaimana peran dan Tusi Kemenko Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (PMK) dapat dilaksanakan dan potensi terjadinya masalah atau kendala yang akan dihadapi dalam jangka waktu menengah selama 5 tahun. Aspek-aspek atau komponen-komponen tersebut meliputi landasan atau legalitas peran dan Tusi Kemenko, kelembagaan, SDM dan manajemen.

#### a. Landasan Peraturan & Kelembagaan

Dalam Pelaksanaan sistem pemerintahan Kementerian Koordinator berpedoman kepada kebijakan-kebijakan baik bersifat undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan Permenko sendiri. Semenjak terbentuknya kabinet kerja terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator yang semula Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat berganti menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Apabila dicermati, terdapat sedikit perubahan yang cukup signifikan terhadap peran dan Tusi Kemenko PMK dibandingkan dengan peran dan Tusi Kemenko Kesra. Perubahan tersebut berkonsekuensi terhadap restrukturisasi keseluruhan bagaimana menjalankan program dan kegiatan. Perbedaan landasan legal kelembagaan dapat dicermati pada Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
Perbandingan Substansi Tusi Berdasarkan Perpres

Tugas/ Fungsi	Perpres 24 Tahun 2010	Perpres 9 Tahun 2015
Tugas	Membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;</li> <li>b. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;</li> <li>c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;</li> <li>d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan</li> <li>f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;</li> <li>b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;</li> <li>c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li> <li>e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan</li> <li>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.</li> </ul>

Secara umum berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, maka tugas Kemenko PMK adalah membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya pada Perpres Nomor 24 Tahun 2010 secara definitif tidak disebutkan pengendalian sebagai tugas secara tersendiri, sedangkan pada Perpres Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan secara tegas akan tugas Pengendalian pada area atau isu pengembangan masyarakat tersebut. Selain itu Perpres Nomor 24 Tahun 2010 menjelaskan bahwa substansi pengembangan kebijakan pada kesejahteraan rakyat. Sementara Perpres Nomor 9 Tahun 2015 menggarisbawahi arah kebijakan Kementerian Koordinator adalah pada bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam konteks ini terminologi Kesejahteraan Rakyat beralih menjadi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kedua Perpres merinci fungsi Kemenko tetap pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada perumusan, penetapan dan pelaksanaan yang terkait pembangunan masyarakat. Bila dicermati perbedaan fungsi saat ini dengan sebelumnya terletak pada fungsi koordinasi yang diletakkan secara bersama dengan sinkronisasi, sebagaimana tertulis pada Perpres Nomor 9 Tahun 2015.

## b. SDM dan Manajemen

SDM aparatur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan latar belakang keilmuan, pengalaman dan pelatihan terkait yang memadai dengan pembangunan kesejahteraan rakyat. Namun

dari segi jumlah, SDM Kemenko PMK masih terbatas.

Tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN) menjadi acuan bagi penyelenggara pemerintahan untuk lebih meningkatkan peransertanya dalam pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. Kemenko PMK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang tertuang di RPJMN 2015-2019. Kemenko PMK merupakan kementerian yang mendapat mandat mengoordinasikan tentang pencapaian kualitas pembangunan manusia Indonesia, antara lain pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*), ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*food security and nutrition*), kesehatan termasuk air dan sanitasi, serta pendidikan. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, Kemenko PMK harus bisa memfasilitasi pemenuhan Indikator kinerja dalam RPJMN.

Selain itu, Kemenko PMK telah melakukan banyak kerjasama internasional (*international cooperations*), baik bilateral maupun multilateral di bidang pembangunan manusia

sehingga dengan terbukanya peluang kerja sama dapat meningkatkan kemampuan Kemenko PMK untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal.

Penekanan perlunya pengendalian pada isu atau bidang PMK yang efektif menjadi salah satu semangat dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2015. Kondisi tersebut tentu membawa konsekuensi logis pada alasan penataan kembali kelembagaan, SDM, maupun manajemen. Kemenko PMK memiliki tugas penting mengkolaborasikan bentuk koordinasi dan sinkronisasi K/L yang berada di bawah koordinasi pada isu bidang PMK untuk dapat menjalankan peran dan tugas masing-masing secara harmonis. Tugas Kemenko PMK tidak hanya sebatas koordinasi dan sinkronisasi, akan tetapi Kemenko PMK juga harus memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan menyelenggarakan pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan PMK.

## 1.2.2 Dinamika Lingkungan Eksternal

Lingkungan strategis eksternal adalah ruang dan media yang mempresentasikan dialektika dan interaksi antar keseluruhan sub sistem baik sosial budaya, lingkungan, teknologi, dan ekonomi serta dinamika politik yang tumbuh dan berkembang pengaruh-mempengaruhi terhadap organisasi Kemenko PMK dalam menjalankan peran sebagai salah satu sub sistem dalam organisasi Pemerintah Indonesia. Dalam perspektif pendekatan struktur-fungsionalis, maka gangguan atau kendala dari suatu sub sistem akan mengakibatkan sub sistem lainnya terganggu dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Keberadaan kondisi atau situasi tersebut harus dicermati dalam konteks

bagaimana masalah dan tantangan menjadi potensial dan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Salah satu kondisi dinamis yang saat ini berkembang tentu adalah iklim demokratis yang sudah memfasilitasi seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk berperan serta dalam pembangunan. Era desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berkembang saat ini, membuka peluang yang lebih luas untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah. Dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah untuk mengelola anggaran, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan koordinasi dari Kemenko PMK, program pro rakyat dapat terselenggara lebih efektif dan efisien.

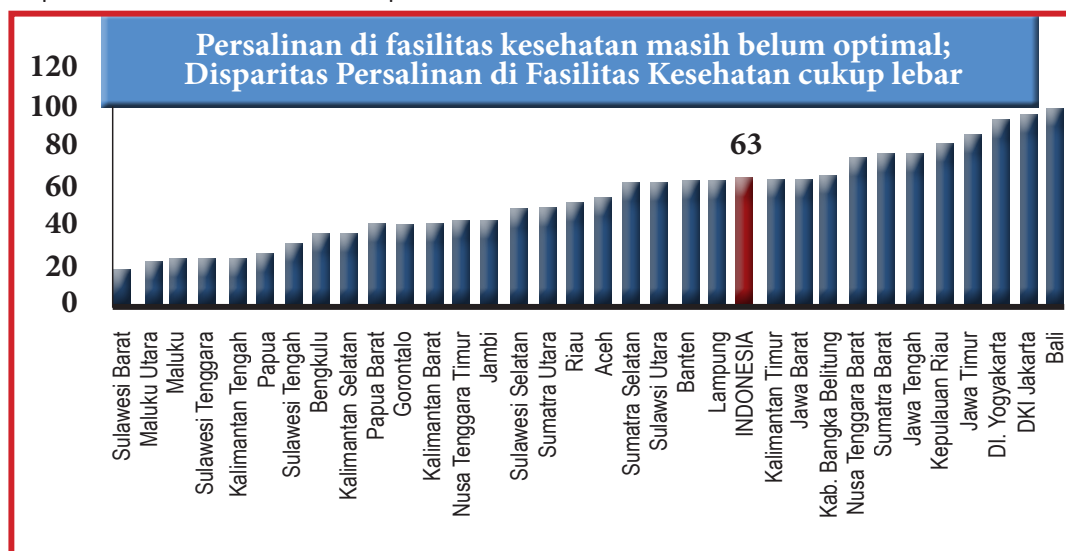
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga memuat bahwa perkembangan kependudukan terdiri dari aspek kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta perencanaan dan wawasan kependudukan. Sedangkan pembangunan keluarga dimaksudkan untuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu prasyarat dalam pengembangan SDM adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.

Beberapa tantangan peningkatan kualitas penduduk meliputi: (a) Masih lemahnya komitmen dan dukungan *stakeholder* terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana,

dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terkait kelembagaan serta perencanaan anggaran; (b) Dibidang kesehatan, perempuan belum mendapatkan haknya untuk mengatur dan menjaga kesehatan reproduksi secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, melahirkan dan nifas. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 terdapat 228/100.000 kelahiran. Angka ini melonjak

menjadi 359/ 100.000 kelahiran pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012), masih jauh dari target MDGs 110/100.000 kelahiran pada tahun 2015; (c) Kualitas pelayanan KB (*supply side*) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/ klinik pelayanan KB maupun fasilitas kesehatan untuk persalinan. Hal ini seperti dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:

**Gambar 2**  
Disparitas fasilitas kesehatan antar provinsi di Indonesia



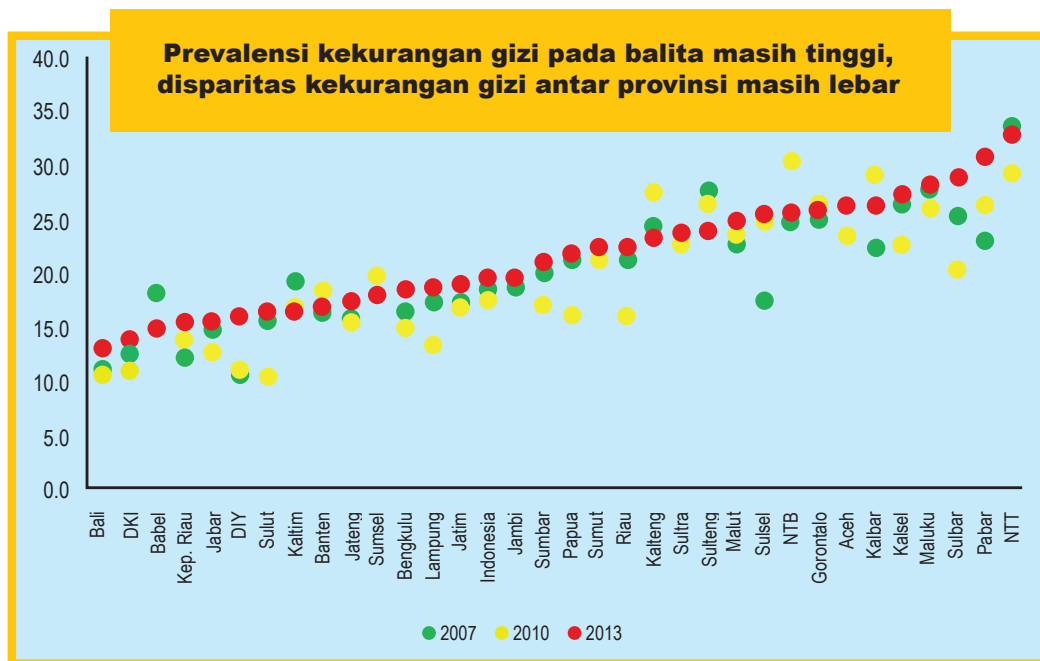
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Percepatan perbaikan gizi masyarakat menghadapi permasalahan yang sangat besar karena kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada saat yang bersamaan dan terjadi seluruh kelompok umur. Kekurangan gizi yang diukur dengan *stunting* telah terjadi sejak anak lahir, dengan prevalensinya meningkat hingga anak

berusia 2 tahun dan terus terjadi hingga usia lima tahun. Masalah disparitas (perbedaan) gizi yang cukup tinggi antar provinsi dan antar kabupaten/kota menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama oleh pemerintah dibawah koordinasi Kemenko PMK seperti dilihat pada Gambar 3 di bawah ini:

**Gambar 3**

Disparitas kekurangan gizi antar provinsi di Indonesia



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh Kemenko Kesra terkait PUG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah tentang PUG; (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program dan kegiatan pembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambil keputusan di Kementerian/

Lembaga maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG.

Pembangunan karakter bangsa dapat dilaksanakan melalui dua jalan yakni, pendidikan dan kebudayaan. Pada wilayah pendidikan, wadah yang dipandang tepat adalah melalui pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan karakter, yang bertujuan untuk membina akhlak mulia, budi pekerti luhur, memupuk jati diri, kepribadian, dan identitas kebangsaan melalui proses pembelajaran di sekolah.

Dalam konteks pendidikan, Pelaksanaan Wajar 12 Tahun ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan



ekonomi yang berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, kenyataannya pada tahun 2012 sebagian dari mereka yaitu sekitar 2,12 persen anak usia 7–12 dan 10,48 persen anak usia 13–15 tahun tidak bersekolah. Dengan uraian permasalahan di atas, tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga yang tidak mampu untuk menurunkan kesenjangan akses pendidikan antar daerah, antar status sosial ekonomi, dan antar jenis kelamin.

Pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (a) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (b) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (c) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (d) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial dan (e) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam

disintegrasi bangsa. Keragaman suku bangsa yang majemuk, akselerasi demokratisasi, disparitas ekonomis yang masih tinggi antar daerah merupakan beberapa faktor yang perlu terus diwaspadai sebagai potensi gangguan terhadap pembangunan nasional. Terjadinya potensi disintegrasi di NAD, Papua, dan konflik horizontal di Ambon, Poso, disadari atau tidak memiliki keterkaitan dengan potensi konflik tersebut.

Pada sisi lainnya, perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa, yang cenderung mengarah pada perebutan pengaruh antar bangsa. Dinamika tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban dunia, munculnya isu-isu teradopsinya nilai-nilai universal, percepatan teknologi informasi dan perubahan kebudayaan nasional, serta kedaulatan pangan maupun energi.

Nilai-nilai universal tersebut antara lain semakin diterima dan menguatnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan individu, kualitas dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal, dan pelestarian lingkungan. Beberapa fenomena global yang mengemuka selain nilai-nilai tersebut antara lain: hedonisme dan permisivisme dalam bentuk kebebasan hubungan seksual, penggunaan zat terlarang dan adiktif, radikalisme dan ekstrimisme, dan nilai-nilai lainnya yang secara substansif tidak menguntungkan nilai-nilai asli (*genuine*) bangsa Indonesia. Teradopsinya atau diterimanya nilai-nilai universal telah memberikan dinamika baru dalam kehidupan berbangsa.



Dinamika interaksi global juga dipacu dan terfasilitasi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Percepatan dan perkembangan TIK telah merubah kultur komunikasi antar manusia dan antar bangsa secara umum. Kemudahan dan bentuk baru komunikasi tersebut memberikan dampak pada perkembangan segi-segi sosial, budaya, politik, ekonomi maupun ideologi.

Perubahan-perubahan tersebut memberikan fakta baru bahwa batas-batas fisik kewilayahan suatu negara semakin kabur sebagai konsekuensi perkembangan TIK. Selain itu, percepatan TIK dan perkembangan

ilmu pengetahuan telah menempatkan kedua dimensi tersebut (Iptek dan TIK) menjadi aset dan modal strategis suatu bangsa. Bangsa yang memiliki penguasaan terhadap Iptek dan TIK berimplikasi pada kemampuan untuk mempengaruhi bangsa lain. Penguasaan Iptek dan TIK ditopang oleh kemajuan ekonomi akan memberikan posisi tawar, sekaligus kemampuan hegemoni yang besar suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Kemajuan Iptek dan penguasaan TIK memberikan posisi penting saat ini bagi “Dunia Barat” dalam relasinya dengan negara-negara lain. ✍



**BAB**

# 2

3

9

13

5

## **BAB 2** VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKO PMK

- 2.1 *VISI KEMENKO PMK*
- 2.2 *MISI KEMENKO PMK*
- 2.3 *TUJUAN KEMENKO PMK*
- 2.4 *SASARAN STRATEGIS KEMENKO PMK*





## 2.1 Visi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kompleksitas dinamika lingkungan yang akan dihadapi Kemenko PMK menjalankan Peran dan tugas serta fungsinya tergambar jelas dalam kondisi umum, potensi dan analisis permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Pencapaian tujuan Nasional melalui Pembangunan Nasional dapat ditangani secara baik, apabila seluruh jajaran institusi pemerintah terkait dapat dikoordinasikan oleh satu institusi dalam jajaran pemerintahan atau kabinet secara efektif.

Selama ini koordinasi di bidang pembangunan mutu manusia dan lingkungannya dalam jajaran kabinet dilakukan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kesejahteraan Rakyat. Namun, saat ini telah berganti nama dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, menyinkronkan, mengendalikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setiap K/L yang mempunyai Peran dan Tusi terkait dengan isu PMK akan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Kondisi tersebut sebagai konsekuensi logis PMK yang memiliki irisan atau *overlapping* dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang dilaksanakan oleh K/L.

Kemenko PMK sebagai organisasi Pemerintah seharusnya memiliki kemampuan merespon secara cerdas kondisi dinamis lingkungan yang secara alamiah tumbuh,

berkembang, dan pengaruh-mempengaruhi. Terdapat fakta bahwa dinamika atau perubahan politik dunia di era globalisasi telah menghadirkan kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global.

Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun dunia dengan munculnya isu-isu diseminasi (penyebaran) nilai-nilai universal, percepatan Teknologi informasi, dan kedaulatan pangan maupun energi. Globalisasi telah menciptakan arena baru berupa kompetisi antar masyarakat atau warga dunia dalam bentuk kompetisi SDM maupun sumberdaya alam. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi logis perlunya suatu bangsa meningkatkan kualifikasi dan mutunya secara terus-menerus. Selain itu kompetisi juga mempermudah perubahan nilai-nilai asli (*genuine*) suatu bangsa sebagai percepatan dan kemudahan pertukaran nilai-nilai antar bangsa. Perubahan nilai dan kebudayaan yang tidak diantisipasi akan berdampak negatif terhadap upaya dan usaha suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko PMK. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang PMK, maka Kemenko PMK dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang PMK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko PMK dalam menjalankan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 memperhatikan pencapaian kinerja periode Kemenko sebelumnya pada 2010–2014. Pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru seperti: pembinaan generasi muda, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan membangun karakter serta jati diri bangsa melalui pelestarian kebudayaan Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi Kemenko PMK 2015-2019 disepakati sebagai berikut:

---

*“Menjadi Koordinator  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan untuk Mewujudkan  
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,  
dan Berkepribadian berdasarkan  
Gotong Royong”*

---

Kemenko PMK memiliki tugas pokok membantu Presiden dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kata “Koordinator” adalah pihak atau pelaku yang menyelenggarakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau

bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Hal ini bermakna bahwa Kemenko PMK sebagai koordinator (pihak yang melakukan koordinasi) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan memiliki kemampuan, kompetensi, dan kesanggupan dalam menyelaraskan dan mengharmonisasikan peran dan Tusi K/L sehingga terwujud PMK yang berkualitas. Dengan demikian Kemenko PMK memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan Kementerian/Lembaga melaksanakan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan baik yang dihasilkan oleh Kemenko PMK maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu PMK.

“Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” adalah bagaimana menyediakan pendidikan dalam makna luas yang berkualitas secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan rakyat yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu dan sanggup bersaing di kancah internasional. Pembangunan kebudayaan adalah menegaskan dan menjaga identitas serta jati diri bangsa, teguh dan harmoni dalam keragaman, serta memperkuat kesadaran berbangsa dan memperdalam kecintaan serta nasionalisme bangsa, sehingga menjadi kekuatan di tengah era globalisasi.

Pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai akan berkontribusi pada terwujudnya “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong”. Indonesia berdaulat adalah Indonesia yang berdaulat dibidang politik semakin memantapkan pembangunan dibidang politik untuk mewujudkan Demokrasi

Politik. Berkemajuan dibidang ekonomi merupakan sikap bangsa untuk menentukan nasib sendiri untuk membangun Demokrasi Ekonomi. Berkepribadian di bidang kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan karakter dan pembangunan bangsa (*Nation and Character building*), yang pada akhirnya bersinergi dengan bidang politik dan ekonomi untuk mewujudkan Demokrasi Sosial secara kongkrit melalui pemantapan nilai-nilai Gotong-Royong dalam masyarakat.

Dengan visi tersebut, eksistensi Kemenko PMK sebagai penggerak utama pembangunan manusia dan kebudayaan menjadi semakin penting dan bernilai manfaat yang tinggi, karena dapat diakui, dipercaya, dan dihormati oleh semua pihak. Kemenko PMK bukan hanya bagian dari pemerintah, melainkan juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta kementerian dan lembaga terkait untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan manusia dan kebudayaan di negara kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” dan “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan”, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

## 2.2 Misi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Perumusan misi Kemenko PMK dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi Kemenko PMK bertujuan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung di dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholders*.

Pada hakekatnya Misi Kemenko menjawab “Untuk apa kehadiran atau eksistensi Kemenko PMK?” di tengah eksistensi K/L lainnya. Pernyataan misi Kemenko PMK yang dikaitkan dengan visi Kemenko PMK dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK

Adapun keterkaitan visi dan misi Kemenko PMK tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagaimana tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**

Keterkaitan Pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019

MISI KEMENKO PMK 2015-2019	
MISI KEMENKO PMK 2015-2019	Menjadi <b>koordinator</b> Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk <b>Mewujudkan</b> Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong.
	1. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
	2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
	3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas.
	4. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.

Penjelasan Misi Kemenko PMK tahun 2015-2019:

**1. Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.** Misi pertama mengandung arti Kemenko PMK adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan PMK. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Kemenko PMK adalah kekuasaan yang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung makna terkait kewenangan pemerintah meliputi kehidupan masyarakat. Tidak ada

suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah, maka kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses atau cara membangun (mendirikan, membina, memperbaiki) yang berorientasi kepada manusia sebagai makhluk yang berakal budi (mampu mengatur makhluk lain), dan pengembangan lingkungan serta Kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti: kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dengan demikian, keberadaan Kemenko PMK memiliki kewenangan dalam hal menyelaraskan dan mengharmoniskan kebijakan terkait isu bidang PMK sehingga dapat menjadi suatu respon komprehensif dan terpadu dalam meningkatkan mutu manusia dan kebudayaan Indonesia.

**2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.**



Misi kedua mengandung arti bahwa pengendalian dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah dirumuskan, ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan target. Pengendalian merupakan salah satu tugas dan fungsi Kemenko PMK sebagai penggerak utama pembangunan manusia dan kebudayaan. Pengendalian dilakukan dengan disertai instrumen pengendalian yang memiliki substansi sarana mempertahankan atau menjamin agar pelaksanaan kebijakan berjalan pada tahapan yang benar, lalu pencapaian sasaran yang efektif dan efisien.

### **3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas.**

Misi ketiga mengandung arti Kemenko PMK sebagai penggerak utama pembangunan manusia dan kebudayaan harus mampu mendorong perwujudan kualitas manusia dan kebudayaan Indonesia yang tinggi dan bermartabat. Kualitas manusia dan kebudayaan menunjukkan adanya upaya maksimal dalam rangka mewujudkan kualitas fisik dan non fisik manusia dan kebudayaan sebagai nilai-nilai instrumental yang akan berkontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan nasional jangka menengah. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang ditempuh melalui jalan TRISAKTI adalah upaya untuk mewujudkan warga negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, warga negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan ber-Bhineka Tunggal Ika. Kualifikasi manusia dan kebudayaan berkonsekuensi pada penyiapan manusia dan kebudayaan dalam bentuk perumusan

strategi yang mampu menghasilkan manusia berkemampuan adaptasi sekaligus kesanggupan berkompetisi di lingkungan global yang semakin kompetitif.

### **4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.**

Misi keempat mengandung arti Kemenko PMK harus mewujudkan kelayakan menjadi koordinator yang efektif dengan cara meningkatkan kompetensi serta kesanggupan menjalankan peran dan tugas serta fungsi yang telah diamanatkan. Kelayakan tersebut akan tercapai dengan syarat semakin meningkatkan mutu organisasi pada aspek-aspek SDM, kelembagaan, dan manajemen. Ketiga aspek tersebut akan terindikasi dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Tata kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Tata Kelola yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Kemenko PMK dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi pegawai dan rakyat yang meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun daya belinya, kesejahteraan spritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Kemenko PMK. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola organisasi.

## 2.3 Tujuan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tujuan Kemenko PMK diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi coordinator, dan arah serta dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan. Tujuan tersebut mengacu kepada

pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan. Tujuan Kemenko PMK secara substansif ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Kemenko PMK untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan visi dan misinya dapat dijelaskan melalui pemaparan pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**

Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Kemenko PMK 2015-2019

KEMENKO PMK 2015-2019		
VISI	MISI	TUJUAN
Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong.	1. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
	2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	
	3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas	b. Meningkatnya Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia
	4. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.	c. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tujuan pertama terkait dengan Peran dan Tusi Kemenko PMK dalam memfasilitasi keharmonisan, keselarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan PMK. Meningkatnya mutu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bermakna upaya-upaya dalam bentuk kebijakan dapat meningkatkan keserasian gerak langkah keseluruhan kementerian yang memiliki irisan kesamaan bidang PMK. Dinamisasi dan harmonisasi tersebut dapat mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan yang bermutu.

Tujuan kedua bermakna upaya pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia adalah upaya untuk mewujudkan warga negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikaridalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan ber-Bhineka Tunggal Ika. Upaya pembangunan tersebut akan mewujudkan pada semakin berkembang dan meningkatnya kualitas hidup sekaligus keberdayaan manusia Indonesia serta semakin melembaga dan berkembangnya nilai-nilai kegotongroyongan. Kualitas hidup dan keberdayaan yang dilandasi nilai-nilai kegotongroyongan akan memberikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif.

Tujuan ketiga tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel menjadi prasyarat dan syarat bagi kesanggupan Kemenko berkompetensi dalam menjalankan peran tusinya. Birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM Kemenko PMK untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi

SDM profesional dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur negara. Membaiknya mentalitas SDM aparatur yang makin profesional dan organisasi serta manajemen yang efektif akan meningkatkan mutu organisasi. Pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan menjalankan Peran dan Tusi yang telah diamanatkan.

## 2.4 Sasaran Strategis Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenko PMK secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran terdapat indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenko PMK. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Kemenko PMK. Program Kemenko PMK terdiri dari:

1. **Program teknis**, yang mencerminkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, dan
2. **Program generik** merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk

mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di Kemenko PMK.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK.

**Tabel 2.3**

Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
T1	Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS1	Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
		SS2	Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan,
T2	Meningkatnya Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia.	SS3	Meningkatnya kemandapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
		SS4	Meningkatnya kemandapan pemberdayaan masyarakat Indonesia.
		SS5	Meningkatnya kemandapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia.
T3	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK.
		SS7	Meningkatnya Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK.
		SS8	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK.

**Sasaran pertama dan kedua** adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Kemenko secara nyata terkait dengan tercapainya koordinasi, sinkronisasi kelembagaan yang mantap dan pengendalian yang efektif dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Ketercapaian koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang semakin meningkat dapat diindikasikan pada konteks seberapa besar tingkat realisasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Selain itu ketercapaian juga diindikasikan dari seberapa besar tingkat kepuasan *stakeholders* Kemenko PMK dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada pelaksanaan kebijakan PMK yang dijalankan oleh Kemenko PMK. Tercapainya sasaran pertama dan kedua akan memfasilitasi keharmonisan, keselarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan PMK.

**Sasaran ketiga, keempat, dan kelima** untuk menerjemahkan tujuan kedua. Sasaran tersebut secara berurutan adalah meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatnya kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia, dan meningkatnya kemantapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia. Sasaran ketiga, yaitu meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar ketercapaiannya akan tercermin pada indikasi semakin profesionalnya pelayanan pada penanggulangan kemiskinan, upaya-upaya pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta pelayanan-pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk seluruh

masyarakat Indonesia. Sasaran keempat, meningkatnya kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia pencapaiannya terindikasikan pada semakin menguatnya dan tepatnya pemberdayaan pada seluruh Indonesia khususnya upaya memberdayakan perempuan, upaya memberdayakan pembangunan pemuda, dan kelompok lain yang berkategori marginal. Selanjutnya sasaran kelima, meningkatnya kemantapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia dimaksudkan tercapainya suatu kondisi dimana nilai-nilai *genuine* yang melembaga semakin diakui dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Secara faktual ketercapaiannya akan ditandai dengan meningkatnya soliditas sosial, partisipasi budaya dan upaya-upaya secara sadar dalam memperkuat kebudayaan.

**Sasaran strategis keenam, ketujuh, dan kedelapan** secara berurutan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK, meningkatnya efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK, dan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK. Ketiga sasaran tersebut adalah mewujudkan secara nyata birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel yang memunculkan kesanggupan dan kompetensi Kemenko dalam menjalankan peran tugasnya. Capaian dari sasaran tersebut dapat dilihat pada semakin meningkatnya kompetensi SDM yang sesuai dengan posisi atau jabatan yang diembannya dalam organisasi, semakin puasnya pelanggan organisasi terhadap implementasi manajemen yang dijalankan organisasi, dan semakin optimalnya akuntabilitas pemanfaatan anggaran. ✍



**BAB**

# 3

3

9

13

5

## **BAB 3** ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL
- 3.2 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENKO PMK
- 3.3 KERANGKA REGULASI
- 4.4 KERANGKA KELEMBAGAAN







### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-3 tahun 2015–2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005–2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005–2009, RPJMN ke-2 2010–2014, RPJMN ke-3 2015–2019, dan RPJMN ke-4 2020–2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 4 berikut ini:

**Gambar 4** Tahapan RPJPN 2005-2025



(Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80)

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005–2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015–2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1

RPJMN 2015–2019 sub bab 2.2, bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi

yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Berdasarkan dinamika tantangan tersebut, dalam strategi Pembangunan Nasional ditekankan pada beberapa hal berikut: pada konteks norma maka perlu diterapkan bahwa (i) Membangun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, (ii) Upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar, dan (iii) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak ekosistem. Selain itu pada konteks pembangunan terdapat juga dimensi pembangunan yaitu (i) Pembangunan manusia dan masyarakat, (ii) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan (iii) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Mencermati kondisi tersebut, nampak bahwa aspek-aspek sumberdaya manusia dan masyarakat sangat diperhatikan dalam strategi pembangunan Nasional.

Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas pembangunan, pada jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Agenda tersebut adalah: (i) Cita

ke-1, Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, (ii) Cita ke-2, Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, (iii) Cita ke-3, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (iv) Cita ke-4; Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (v) Cita ke-5, Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, (vi) Cita ke-6, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, (vii) Cita ke-7, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik, (viii) Cita ke-8, Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (ix) Cita ke-9, Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mencapai Visi dan terlaksananya agenda pembangunan nasional 2015-2019 maka sasaran utama Pembangunan adalah: (i) Sasaran Makro; (ii) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, (iii) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; (iv) Sasaran Dimensi Pemerataan; (v) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; dan (vi) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Pada sasaran makro pembangunan manusia dan masyarakat dan ekonomi dapat ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**

Sasaran Makro RPJMN 2015-2019

INDIKATOR	2014* (BASELINE)	2015	2019
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>			
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83 (metode lama)	69,4 (metode baru)	76,3 (metode lama)
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat <sup>1</sup>	0,55	-	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,40	0,36
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	5,7%	8,0 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.403	-	72.217
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	-	-
▪ Tingkat Kemiskinan	10,96 % *)	10,3	7,0-8,0%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	5,6%	4,0-5,0%

*(Sumber: RPJMN 2015-2019)*

<sup>1</sup>Indeks Pembangunan masyarakat merupakan komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat.

\*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.

Pada sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat dapat dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat RPJMN 2015-2019

INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2019
<b>Pembangunan Manusia dan Masyarakat</b>		
<b>Kependudukan dan Keluarga Berencana</b>		
▪ Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk	1,49%/tahun (2000-2010)	1,19%/tahun (2010-2020)
▪ Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	2,6 (2012)	2,3

	INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2019
<b>Pendidikan</b>			
▪	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,1 (tahun)*	8,8 (tahun)
▪	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun	94,1%*	96,1 (%)
▪	Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4%*	68,4 (%)
▪	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%*	84,2%
▪	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%*	81,0%
▪	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%*	84,6%
▪	Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%*	65,0%

**Kesehatan**

1.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran.	359 (SDKI 2012)	306
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	32 (2012/2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (persen).	19,6 (2013)	17
	d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen).	32,9 (2013)	28
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.	297 (2013)	245
	b. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen).	0,43 (2013)	<0,5
	c. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen).	25,8 (2013)	23,4
	d. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen).	28,9 (2013)	28,9
	e. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun	18,3 (2013)	15,3

	INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2019
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi.	0	5.600
	b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	-	95
4.	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan		
	a. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen).	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	b. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan.	1.920	3.840

#### Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

• Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,6 (2013)	Meningkat
• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5 (2013)	Meningkat

#### Perlindungan Anak

• Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Anak laki-laki: 38,62%; Anak perempuan: 20,48% (2013)	Menurun
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------

#### Pembangunan Masyarakat

• Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial).	0,55 (2012)	Meningkat
• Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal).	0,49 (2012)	Meningkat
• Jumlah konflik sosial (per tahun)	164 (2013)	Menurun

(Sumber: RPJMN 2015-2019)

Untuk merespon kondisi dan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai tersebut maka arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (7) mengembangkan dan pemerataan pembangunan daerah, (8) menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional, serta percepatan pengembangan ekonomi kelautan.

Selanjutnya agenda pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam buku 1 RPJMN 2015-2019 dirinci menjadi beberapa sub agenda pembangunan. Berdasarkan agenda dan sub agenda pembangunan tersebut terdapat 13 sub agenda pembangunan yang menjadi mandat untuk dilaksanakan Kemenko PMK.

### 3.1.1 Sasaran Sub Agenda Pembangunan yang terkait dengan PMK

Sasaran pembangunan pada agenda dan sub agenda yang menjadi mandat Kemenko PMK dijabarkan sebagai berikut:

#### ***a. Nawacita ke-2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.***

Sub Agenda: **Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.** Sasaran pembangunan sub

agenda ini adalah meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

#### ***b. Nawacita ke-3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.***

1. Sub Agenda: **Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris** dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam NKRI di beberapa daerah dengan kategori (a) Pengembangan Kawasan Perbatasan dan pulau-pulau terluar, (b) Daerah Tertinggal dan terpencil, (c) Desa tertinggal, (d) Daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

2. Sub Agenda: **Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antarkelompok ekonomi masyarakat** dengan sasaran menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0–8,0 persen pada tahun 2019 dengan sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara:

1. Meningkatkan potensi para pekerja, sehingga memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi mas-

- asyarakat yang kurang mampu (*decent job*);
2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
  3. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat;
  4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;
  5. Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia;
  6. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu.
  7. Mengembangkan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan
  8. Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja
  9. Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.
- c. Nawacita ke-4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.**
- Sub agenda: **Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal** dengan sasaran tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
- d. Nawacita ke-5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.**
1. Sub agenda: **Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana**, dengan sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

**Tabel 3.3**

Tabel Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB

INDIKATOR	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
Angka kelahiran ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	Per- perempuan usia reproduktif 15-49 tahun	2,60	2,3

INDIKATOR	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> dengan perhitungan baru)	%	11,4	9,9
Angka prevalensi kontrasepsi ( <i>contraceptive prevalence rate/CPR</i> ) semua cara ( <i>all methods</i> )	% perempuan usia 15-49 tahun	61,9	66,0
Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	18,3	23,5
Tingkat putus pakai kontrasepsi	%	27,1	24,6

(Sumber: RPJMN 2015-2019)

2. Sub agenda: **Pembangunan Pendidikan** khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dengan sasaran sebagai berikut:

- ◆ Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah

**Tabel 3.4**

Tabel Sasaran Pembangunan Pendidikan

JENJANG/KOMPONEN	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,30	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,1
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,40	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9
II. Pendidikan Menengah			
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	%	55,30	67,5
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C	%	79,20	91,6
III. Pendidikan Anak Usia Dini			
Angka Partisipasi PAUD	%	66,80	77,2
IV. Pendidikan Tinggi			
Angka Partisipasi Kasar PT	%	28,50	36,7

(Sumber: RPJMN 2015-2019)



*\*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010.*

3. Sub agenda: **Pelaksanaan Program Indonesia Sehat**, dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya

pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator berikut:

**Tabel 3.5**

Tabel Sasaran Pembangunan Kesehatan

NO.	INDIKATOR	STATUS AWAL	2019
Kesehatan			
1.	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran.	346 (SP 2010)	306
	2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.	32 (2012/2013)	24
	3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen).	19,6 (2013)	17
	4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak balita (persen).	32,9 (2013)	28
2.	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.	297 (2013)	245
	2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen).	0,46 (2014)	<0,5
	3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria.	212 (2013)	300
	4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen).	25,8 (2013)	23,4

NO.	INDIKATOR	STATUS AWAL	2019
	5. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen).	15,4 (2013)	15,4
	6. Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun.	7,2 (2013)	5,4

3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi dan terakreditasi.	0 (2014)	5.600
	2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi dan terakreditasi nasional.	10 (2014)	481
	3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi.	71,2 (2013)	95

4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan

	1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen).	51,8 (Oktober 2014)	Min 95
	2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan.	1.015 (2013)	5.600
	3. Persentase RSU kab/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis.	25 (2013)	60
	4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas.	75,5 (2014)	90,0
	5. Persentase obat yang memenuhi syarat.	92 (2014)	94

(Sumber: RPJMN 2015-2019)

**e. Nawacita ke-6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.**

Sub agenda: **Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi** dengan Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas Iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang mendukung:
  - a) daya saing sektor produksi barang dan jasa;
  - b) keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
  - c) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
2. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan.
3. Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

**f. Nawacita ke-7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis dan ekonomi domestik.**

Sub Agenda: **Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana** dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki risiko tinggi pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana.

**g. Nawacita ke-8. Melakukan revolusi karakter bangsa,** memiliki sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan dikalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
3. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama dikalangan siswa-siswa di sekolah;
5. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat terserap oleh pasar kerja;

7. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi;
8. Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

h. ***Nawacita ke-9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.***

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, kepercayaan antarwarga, perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
2. Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
3. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Meningkatnya ketaatan semua unsur didalam masyarakat terhadap hukum sesuai amanat konstitusi;
5. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan karakter bangsa;
6. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antar suku-bangsa secara nasional maupun internasional;
7. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan;
8. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama dikalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
9. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional;
10. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama yang

ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;

11. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (i) meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (ii) posisi papan

atas pada kejuaraan *South East Asia (SEA) Games* dan *ASEAN Para Games 2015, 2017, dan 2019*; dan (iii) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *SEA Games* dan *ASEAN Para Games 2018*, serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games 2016*.

Selanjutnya Tabel 3.6 menjelaskan keterkaitan antara Nawacita dengan Agenda Pembangunan Kemenko PMK sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

Nawacita dan Agenda Pembangunan Kemenko PMK

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
1.	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.	-	-	-
2.	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan	Meningkatkan kualitas hidup, peran politik, dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
3.	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan</li> <li>• Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (IPM, SPM, Kemiskinan)</li> </ul>	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Kesejahteraan Masyarakat, SDM, serta penguatan keberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peletakan dasar-dasar dimulainya Desentralisasi Asimetris</li> <li>• Penanggulangan kemiskinan dan Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat</li> </ul>

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Tersedianya Sistem Perlindungan	Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan	Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal
5.	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Kualitas Hidup: Ibu-Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Gizi	Penguatan kebijakan keluarga berencana dan sejahtera, Penguatan kebijakan pemenuhan hak pendidikan, akses, mutu dan peran masyarakat dalam pendidikan, Pemenuhan pelayanan kesehatan kelompok masyarakat, mutu pelayanan, gizi, dan pemerataan kualitas pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana</li> <li>• Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar</li> <li>• Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat</li> </ul>
6.	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Daya Saing	Peningkatan penelitian pengembangan, pelayanan perekayasaan teknologi, penguatan Sumberdaya Informasi dan pengetahuan, peningkatan mutu SDM Iptek dan penciptaan taman-taman sains dan teknologi nasional	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Pengelolaan bencana

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa	Kualitas Pendidikan, Wawasan Kebangsaan	Pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi	Revolusi karakter bangsa
9.	Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Terbangunnya Modal Sosial, Penguatan Lembaga Budaya, Kerukunan Beragama	Penguatan dan pengembangan: pendidikan kebhinekaan dan pekerti, modal dan kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar agama, peran kepemudaan serta kesetiakawanan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</li> <li>· Peningkatan kualitas pemahaman dan Pengamalan ajaran agama</li> </ul>

Bidang PMK melibatkan banyak K/L sehingga membutuhkan peran penyelarasan dan harmonisasi kebijakan yang dapat diperankan oleh Kemenko PMK berdasarkan Tusi yang telah diamanatkan. Peran dan Tusi Kemenko PMK diharapkan dapat meminimalkan dan mereduksi masalah dan tantangan utama pembangunan khususnya yang terkait PMK, berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PMK. Kemenko PMK adalah salah satu bagian yang terlibat dalam suatu sistem Pembangunan tersebut, dan akan memberikan kontribusi positif dan signifikan apabila Peran dan Tusi Kemenko PMK dapat dijalankan secara efektif.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus ditingkatkan, sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi antara lain: ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Secara faktual analisis kondisi pembangunan 5 (lima)

tahun ke depan sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2015–2019 secara khusus terdapat tantangan utama dalam pembangunan SDM. Tantangan pembangunan SDM dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat**, meliputi bagaimana meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan *provider* dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional;
- b. **Tantangan dalam pembangunan pendidikan** meliputi, bagaimana mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan
- revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;
- c. **Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa** adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat **persatuan** bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
- d. **Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan** adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan
- e. **Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya** adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya,



serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Mandat penyelenggaraan Koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L dalam pemerintahan baru. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan PMK, tingginya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan non fisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, antara kolektivitas waktu lampau– kini–dan masa depan, serta antar kewilayahan. Dengan demikian, Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dapat berkontribusi dan berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan. Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan Kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda prioritas (Nawacita) maupun sub agenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi PMK yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar **5 (lima) fokus koordinasi program & kegiatan yang dilakukan kementerian dan lembaga/ masyarakat dalam pembangunan manusia dan kebudayaan**. Lima fokus koordinasi tersebut adalah:

- 1) Selaras Basis Data
- 2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar
- 3) Pembangunan Manusia Berkarakter
- 4) Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Pembangunan Desa Semesta

#### Gambar 5

5 (lima) fokus koordinasi kementerian PMK



Pemberian nomor pada masing-masing fokus, bukanlah sebuah indikasi urutan penyelenggaraan fokus dalam koordinasi PMK. Kelima fokus dimaksud untuk membuat kategori pemusatan perhatian pada keseluruhan PMK yang melibatkan banyak K/L. Berikut titik-titik pusat koordinasi dalam kerangka PMK:

**Fokus pertama, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data** adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada penggalangan seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka PMK, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait. Penggalangan keseluruhan data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data yang menyatu, terintegrasi, dan memudahkan proses pengambilan keputusan dalam PMK. Penggalangan keseluruhan data dan informasi juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat terverifikasi, valid (terpercaya), reliabel (andal), dan disepakati sebagai data dan informasi

bersama dalam PMK. Keberhasilan Fokus koordinasi yang pertama, akan memberikan kemudahan bagi K/L yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam PMK, sekaligus memudahkan koordinasi, verifikasi, efektivitas dan efisiensi bagi Kemenko PMK dalam mewujudkan pencapaian tujuan PMK.

**Fokus kedua, yaitu Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar** adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada terpenuhinya dan terfasilitasinya bidang-bidang pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia dan masyarakat Indonesia. Pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar adalah keseluruhan kerangka pembangunan yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Pembangunan Kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dan pembangunan dalam mewujudkan keamanan khususnya Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Keberhasilan fokus koordinasi akan mempermudah tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas serta semakin meningkatnya ketentraman masyarakat sebagai wujud dirasakannya kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan dan memecahkan masalah warganya. Fokus jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar meliputi : a).Pendidikan, b).Kesehatan, c).Pekerjaan umum, d).Penataan Ruang, e).Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, f) ketentraman, g).ketertiban umum, h). Perlindungan masyarakat, i). sosial, j).indentitas k). infrasrtuktur dasar (air bersih dan sanitasi).

**Fokus ketiga, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Manusia Berkarakter**

adalah adalah upaya Kemenko PMK dalam memusatkan titik koordinasi pada kerangka pembangunan dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi serta penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinekaan dan pekerti, kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar agama, serta kesetiakawanan sosial. Fokus ketiga dimaksudkan sebagai upaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai pendidikan yang luhur dari berbagai sumber baik agama, budaya lokal, dan nilai-nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat Indonesia. Fokus ketiga juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya lokal yang *genuine* (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian pembangunan dalam rangka merevolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

**Fokus keempat, yaitu fokus koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat,** adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada daya serta upaya memunculkan, memfasilitasi potensi, dan keberdayaan masyarakat Indonesia. Pengembangan potensi dan keberdayaan masyarakat Indonesia adalah semua kerangka pembangunan dalam peningkatan peranan perempuan, pemuda, keluarga dalam konteks kontribusinya pada pemecahan-pemecahan masalah diri sendiri, kelompok, dan atau komunitas maupun partisipasinya dalam pembangunan dalam makna yang luas. Potensi dan keberdayaan juga dimaknai dalam upaya meningkatkan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi untuk

meningkatkan daya saing. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian berupa tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan meningkatnya produktivitas rakyat, daya saing, dan kemajuan bangsa.

**Fokus yang terakhir atau fokus kelima, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Desa secara keseluruhan atau Desa Semesta.** Koordinasi dalam Pembangunan desa adalah upaya Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan perdesaan yang bermartabat, memperkuat pembangunan daerah berlandaskan desentralisasi asimetris, serta upaya-upaya mengurangi jarak atau ketimpangan antar Kelompok Ekonomi Masyarakat. Fokus koordinasi pembangunan desa berupaya untuk memfasilitasi K/L yang terlibat dalam pembangunan fisik dan non fisik perdesaan akan bersatupadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mewujudkan daerah dan desa yang sejahtera dimana masyarakatnya hidup harmoni, adil, dan makmur. Keberhasilan koordinasi kelima ini akan memudahkan pencapaian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Terasfasilitasinya pembangunan desa akan memperkuat nilai-nilai nasionalisme sebagai bagian dari NKRI.

Kelima fokus koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Kemenko PMK dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian PMK yang terkait dengan K/L dan menjadi Tusi Kemenko PMK sekaligus secara logis memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pencapaian pembangunan yang termaktub dalam agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan sasaran strategis RPJMN ke-III maka pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan salah satu komponen strategis untuk mencapai visi pembangunan yaitu mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia bila dilihat dari perspektif strategi pembangunan nasional maka akan berlandaskan pada landasan operasional TRISAKTI dengan prasyarat yaitu: Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Bila mencermati prasyarat tersebut landasan berpikir dalam visi pemerintahan ke depan, sejalan dengan apa yang pernah didengungkan oleh Soekarno sebagai *Nation and Character Building*. Dengan berdaulat di bidang politik Indonesia semakin memantapkan pembangunan di bidang politik untuk mewujudkan demokrasi politik. Berdikari di bidang ekonomi merupakan sikap bangsa untuk menentukan nasib sendiri untuk membangun demokrasi ekonomi. Berkepribadian di bidang kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan karakter dan pembangunan bangsa (*Nation and Character building*), yang pada akhirnya bersinergi dengan bidang politik dan ekonomi akan mewujudkan demokrasi sosial yang secara kongkrit memantapkan nilai-nilai gotong-royong dalam masyarakat. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dengan jalan TRISAKTI akan memberikan **landasan kebijakan, watak pembangunan**, dan isi dalam **semangat pembangunan** Nasional dalam 3 dimensi pembangunan yaitu Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang ditempuh melalui jalan TRISAKTI adalah upaya untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki **jiwa kebangsaan**

dalam kehidupan **demokrasi Indonesia**, Warga Negara yang **berdikari** dalam perekonomian yang **berkeadilan**, dan mewujudkan Bangsa yang **bergotong royong** dan ber-**Bhineka Tunggal Ika**. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, akan dilaksanakan dalam kerja nyata melalui upaya kerjasama seluruh komponen bangsa, kebijakan negara, program-program pemerintah, dan melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Hasil atau wujud pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut mengarahkan Peran Kemenko PMK dalam memfasilitasi pencapaian PMK dalam berbagai dimensinya.

Apabila dikerucutkan maka terdapat 3 dimensi pembangunan Manusia dan kebudayaan yang perlu difasilitasi oleh Kemenko PMK. Arah kebijakan maupun strategi dalam PMK dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam DIMENSI POLITIK meliputi berbagai upaya, kebijakan dan program yang diarahkan pada Pendidikan Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Pembentukan Aparatur Negara yang memiliki komitmen sebagai pelayan rakyat, dan memastikan Kebutuhan dan pelayanan dasar rakyat terpenuhi.** Selain itu agenda strategis yang penting dalam membangun kepercayaan rakyat kepada negara dan membangun wibawa kehadiran negara di tengah rakyatnya, adalah bagaimana negara dapat memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar bagi rakyatnya, yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi rakyat merupakan landasan dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia.
- b. **Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam DIMENSI EKONOMI dilakukan melalui upaya, kebijakan, dan program yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan Iptek untuk ekonomi kerakyatan, dan membantu akses permodalan bagi ekonomi kerakyatan.** Pemberdayaan masyarakat dilakukan baik pada kelompok masyarakat maupun pemberdayaan melalui pembangunan kawasan. Kebijakan dan program pembangunan ke depan juga akan dilaksanakan dengan mengutamakan keselarasan pembangunan antar kawasan, akses infrastruktur ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kearifan budaya lokal. Agenda penting lainnya dalam membangun kemandirian dibidang ekonomi yang berada ditengah persaingan pasar dan persaingan antar negara adalah menggelorakan semangat kita bersama, untuk menggunakan produk dalam negeri. Dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri maka secara langsung akan menggerakkan roda dan memperkuat ekonomi Indonesia. Adanya arah pembangunan manusia dan kebudayaan yang selaras antara ekonomi dan budaya tersebut berkonsekuensi pada tercapainya dua sasaran sekaligus yaitu kemandirian ekonomi dan memperteguh kebudayaan yang berkepribadian.
- c. **Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam DIMENSI SOSIAL BUDAYA dilakukan melalui upaya, kebijakan, dan program yang diarahkan pada pendidikan dan pembangunan karakter bangsa gotong royong, pembangunan kehidupan beragama yang berkebudayaan, memperteguh toleransi, melindungi kelompok marjinal,**

**pemberdayaan perempuan, penguatan kesetiakawanan sosial, penguatan budaya sebagai kekayaan budaya Indonesia, dan membangun soliditas sosial dalam pembangunan budaya.** Salah satu agenda strategis ke depan adalah bagaimana membangun ke-Bhineka Tunggal Ika ini berbasiskan pada kearifan lokal. Agenda pembangunan lainnya dalam dimensi ini adalah membangun karakter generasi muda yang berjiwa bhineka tunggal ika dan gotong royong. Melalui olahraga, kependuan, kegiatan anak muda membangun negeri seperti Kuliah Kerja Nyata turut membangun bangsa Indonesia agar tetap berkarakter demi masa depan yang lebih cerah.

Dimensi-Dimensi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut akan tercapai dan terlaksana, apabila peran Kemenko mampu memfasilitasi dan melayani dengan maksimal sesuai peran dan Tusi yang telah diamanatkan. Pada hakekatnya keterkaitan peran dan tusi Kemenko PMK adalah institusi yang melakukan intervensi pelayanan pada dimensi-dimensi PMK sehingga terwujud, warga negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, warga negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan ber-Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian intervensi perubahan terencana (*planned change*) pada masyarakat untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah pelayanan yang seharusnya diselenggarakan oleh Kemenko PMK. Hal tersebut memiliki arti bahwa pencapaian PMK yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK dapat diindikasikan seberapa tinggi

signifikansi penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan dapat berkontribusi pada pencapaian dan perwujudan PMK.

Sesuai dengan sasaran strategis RPJMN ke-III maka pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan salah satu komponen strategis untuk mencapai visi pembangunan yaitu: mencapai kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015–2019) yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, merupakan dasar pertimbangan Kemenko PMK dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan tahun 2015–2019. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMN 2015–2019, maka Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya sebagai mana di bawah ini:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan peran koordinasi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan (3P) PMK”, dengan strategi sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan mutu komunikasi kelembagaan.
  - b. Meningkatkan keterlibatan K/L pada 3P PMK.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan”, ditetapkan arah kebijakan

- "Peningkatan peran pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan", dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan keterlibatan K/L pada pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L.
  - b. Meningkatkan kualitas pengendalian yang baku dan terstandarisasi.
3. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat", dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pangan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan & pelayanan sosial.
  - b. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan administrasi kependudukan.
4. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia", ditetapkan arah kebijakan "Peningkatan kesadaran peran dan keberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda", dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kesadaran & partisipasi masyarakat memberdayakan ibu dan keluarga.
  - b. Meningkatkan keberdayaan & peran perempuan.
  - c. Meningkatkan keberdayaan dan peran generasi muda.
5. Untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kemantapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia", ditetapkan arah kebijakan "Penguatan kesetiakawanan sosial dan kebudayaan", dengan strategi sebagai berikut:
- a. Memperkuat kesetiakawanan dan peran kelembagaan sosial.
  - b. Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK", ditetapkan arah kebijakan "Penguatan Sistem Manajemen SDM yang memfasilitasi pencapaian kompetensi, peran, dan kinerja dalam organisasi", dengan strategi yakni "Memperkuat sistem manajemen Pengembangan SDM aparatur".
7. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK", ditetapkan arah kebijakan "Penerapan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan sumberdaya organisasi", dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memudahkan dan mendukung pencapaian kinerja lembaga dan pegawai.
  - b. Memperkuat sistem informasi manajemen.
  - c. Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK", ditetapkan arah kebijakan "Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung kese-



luruhan kegiatan Kemenko PMK”, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Rekapitulasi arah kebijakan dan strategi Kemenko PMK untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kemenko PMK 2015-2019 dapat dilihat pada tabel **Lampiran 1**. Berdasarkan keseluruhan paparan dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, maka terdapat keterkaitan yang jelas dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan Kemenko PMK dalam mewujudkan dan melaksanakan mandat yang telah ditetapkan.

### 3.2.1 Program dan Kegiatan

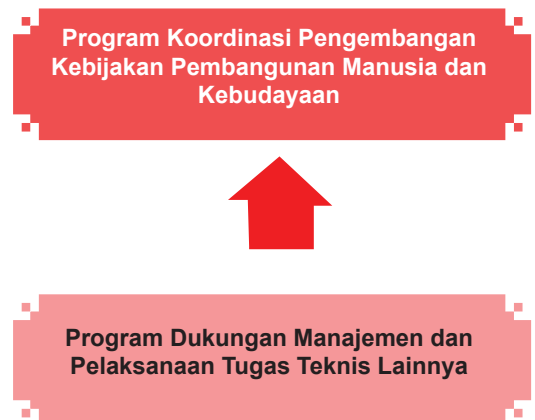
Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019 mengacu pada strategi yang telah dipilih dalam rangka mewujudkan setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenko PMK akan melaksanakan 1 (satu) program teknis, yaitu “Program **Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**”, dan 1 (satu) program generik yakni “Program **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK**”.

Program Teknis ini memayungi berbagai kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilaksanakan

oleh unit kerja Deputi yang melaksanakan 3 *Business Process* dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu: koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Sedangkan Program Generik merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenko PMK yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan pengembangan dan manajemen sumberdaya manusia, manajemen bisnis dan proses organisasi, manajemen aset dan sarana kegiatan, pelayanan kehumasan dan hukum, manajemen keuangan, penyusunan program kerja, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hubungan antar program teknis dan generik Kemenko PMK dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK, adalah sebagai berikut:

#### Gambar 6

Hubungan antara program teknis dengan program generik



Rekapitulasi program dan kegiatan Kemenko PMK dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemenko PMK, baik bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015 -2019 yang diuraikan pada **Lampiran 2**.

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kemenko

PMK, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015-2019, sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan kegiatan:
  - a. Koordinasi kebijakan pengurangan resiko bencana.
  - b. Koordinasi kebijakan tanggap cepat bencana.
  - c. Koordinasi kebijakan penanganan pasca bencana.
  - d. Koordinasi kebijakan konflik sosial.
  - e. Koordinasi kebijakan penanganan kemiskinan.
  - f. Koordinasi kebijakan penguatan kompensasi sosial.
  - g. Koordinasi kebijakan jaminan sosial.
  - h. Koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia.
  - i. Koordinasi kebijakan pelayanan kesehatan.
  - j. Koordinasi kebijakan kependudukan dan KB.
  - k. Koordinasi kebijakan ketahanan gizi kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lingkungan.
  - l. Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
  - m. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
  - n. Koordinasi kebijakan PAUD, Dikdas dan pendidikan masyarakat.
  - o. Koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan keterampilan bekerja.
  - p. Koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan iptek.
  - q. Koordinasi kebijakan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama.
  - r. Koordinasi kebijakan pembinaan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan.
  - s. Koordinasi kebijakan warisan budaya.
  - t. Koordinasi kebijakan nilai dan kreativitas budaya.
  - u. Koordinasi kebijakan kepemudaan.
  - v. Koordinasi kebijakan keolahragaan.
  - w. Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
  - x. Koordinasi kebijakan pemberdayaan perempuan.
  - y. Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.
  - z. Koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.
  - dd. Koordinasi kebijakan pemberdayaan desa.
  - ee. Koordinasi kebijakan pemberdayaan kawasan strategis dan khusus.
  - ff. Koordinasi kebijakan pemberdayaan kawasan perdesaan.
  - gg. Koordinasi penanganan masalah strategis bidang kesra.
  - hh. Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN).
  - ii. Sekretariat koordinasi kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK, dengan kegiatan:
  - aa. Peningkatan dan pengelolaan urusan informasi dan persidangan.
  - bb. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data, pelaporan dan administrasi kerjasama.



- cc. Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum.
- dd. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas kementerian PMK.
- ee. Penyelenggaraan pembinaan Korpri.
- ff. Koordinasi kajian bidang PMK.
- gg. Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Kementerian PMK untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen berbagai regulasi terkait. Perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang dilakukan diharapkan dapat meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan kegiatan dan memaksimalkan pencapaian output dan hasil kegiatan tersebut.

Sejalan dengan RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi kebijakan juga dimaksudkan mendorong harmonisasi dan penyalarsan kebijakan yang memaksimalkan capaian sebagai wujud pengukuran kinerja PMK, dan menjadi katalisator sekaligus

pemampu (*enabler*) bagi pihak terkait yang secara faktual memiliki irisan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam PMK.

Kementerian PMK memiliki peran koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang mendukung efektivitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional bidang Manusia dan kebudayaan. Terkait dengan 13 sub agenda PMK sebagai penjabaran dari Nawacita, maka terdapat minimal 8 K/L yang berada di bawah koordinasi Kementerian PMK. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, koordinasi Kementerian PMK mencakup: 1) Kementerian Agama; 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4) Kementerian Kesehatan; 5) Kementerian Sosial; 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8) Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Dalam memantapkan upaya untuk mensinergikan kebijakan dalam kerangka regulasi, beberapa prinsip perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuen adalah:

- a. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat dan kerugiannya untuk masyarakat. Regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib dan transparan akan menciptakan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang terselenggara secara optimal.
- b. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan

- dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.
- c. Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
  - d. Kerangka Regulasi Jangka Menengah berisi kebutuhan Regulasi dan/atau arah kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
  - e. Kerangka Regulasi Tahunan berisi kebutuhan regulasi dan/atau regulasi di bawah Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan untuk mewujudkan pemenuhan RPJMN.
3. Penyiapan kebijakan mengenai peningkatan kesehatan dan perilaku hidup sehat.
  4. Penyiapan kebijakan mengenai pendidikan dan agama kehidupan kerukunan beragama.
  5. Penyiapan kebijakan mengenai kebudayaan dan partisipasi penguatan kebudayaan.
  6. Penyiapan kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan Pengarusutamaan Gender yang diharapkan dapat memberdayakan perempuan dan kualitas remaja putri, terpenuhinya hak-hak perempuan, dan menjadi faktor pengungkit bagi terciptanya pembangunan manusia Indonesia.
  7. Penyiapan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan.
  8. Penyiapan kebijakan mengenai pembinaan generasi muda untuk mewujudkan manusia yang unggul dan berkualitas dengan karakter mampu menguatkan ke-Indonesiaan kita, kemampuan menyaring terhadap derasnya arus globalisasi, dan kecintaan pada tanah air.

Kemenko PMK dalam menjalankan peran dan Tusi yang telah diamanatkan akan mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku, yaitu Regulasi yang mengatur Kemenko PMK dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan K/L terkait. Selanjutnya berdasarkan taat asas hukum dan legalitas maka, Kemenko PMK memperjelas peran sehingga memberikan kemudahan, keefektifan, dan penguatan kerjasama dengan K/L secara maksimal. Untuk memperjelas pelaksanaan peran Kemenko PMK sebagai koordinator, maka kebutuhan kerangka regulasi Kemenko PMK dijabarkan pada **Lampiran 3**. Selanjutnya regulasi mengenai penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait sinergitas dengan K/L yang menjadi mitra dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan PMK, meliputi:

1. Penyiapan kebijakan mengenai kerawanan sosial dan dampak bencana
2. Penyiapan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial

Penyiapan kebijakan mengenai penyediaan data yang valid, *reliable* dan disepakati bersama dalam bentuk pengelolaan data terintegrasi memanfaatkan sistem manajemen informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada fokus-fokus koordinasi program kegiatan yang dilakukan oleh K/L, yaitu pada fokus (i) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (ii) Pemberdayaan Masyarakat, (iii) Pembangunan Desa Semesta, dan (iv) Pembangunan Manusia Berkarakter.<sup>10</sup>

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian/lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan

aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kerangka kelembagaan Kemenko PMK memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main/tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/ lembaga pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Berdasarkan analisis kebutuhan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK, maka ditemukan bahwa terdapat kebutuhan dari *stakeholder* PMK agar Kemenko PMK memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk meningkatkan peran dan Tusi koordinasi dan sinkronisasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan PMK. Kondisi tersebut berimplikasi pada kebutuhan proses kerja yang sistematis, tata laksana organisasi yang memberikan jaminan akuntabilitas manajemen, penyediaan data dan informasi yang valid dan *reliable*, yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kerangka kelembagaan Kemenko PMK diarahkan untuk mengawal 5 fokus koordinasi dalam pelaksanaan agenda pembangunan di bidang PMK, yaitu kelembagaan yang mampu menopang dan mengefektifkan: (i) keterpaduan basis data dan informasi, (ii) fasilitasi penjaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (iii) fasilitasi Pembangunan Manusia Berkarakter, (iv) fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dan (v) fasilitasi Pembangunan Desa Semesta. (. Efektifitas kelembagaan yang menjalankan 5 fokus koordinasi tersebut, tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik Kemenko PMK yang terindikasi pada: (i) Kemantapan Pelayanan, (ii) Kemantapan Pemberdayaan, (iii) dan Kemantapan perilaku Gotong Royong. Berlandaskan arah dan kerangka pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa kebutuhan penyempurnaan ke depan terkait kerangka kelembagaan PMK. Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah ditetapkan berdasarkan Pepres nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam Kepres tersebut, pengaturan kelembagaan mencakup: kedudukan tugas dan fungsi organisasi, tata kerja, dan pendanaan. Struktur organisasi Kementerian Koordinator berdasarkan prepres dimaksud dapat dilihat pada **lampiran 4**.

### 3.4.1 Kebutuhan Tata Laksana

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut.

1. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkroni-

sasi dan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional dan holistik, dan meminimalkan budaya tersekat-sekat (pendekatan sektoral).

2. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas perencanaan, penyusunan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien.
3. Perlunya penetapan standar dan prosedur yang seragam dan sesuai dengan ketentuan dalam koordinasi dan sinkronisasi dan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang melibatkan interaksi kelembagaan antara Kemenko PMK dan K/L.
4. Perlunya penelaahan mendalam atas *standard operating procedure* di Kemenko PMK khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan oleh Kemenko PMK.

### 3.4.2 Kebutuhan Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan sistem pengelolaan SDM Kemenko PMK sebagai berikut:

1. Perlunya penyesuaian strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan renstra Kemenko PMK 2015-2019, yakni

menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka, namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan Kemenko PMK, antara lain:

- a. Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan,
- b. Membangun standar kompetensi jabatan,
- c. Menganalisis kesenjangan kompetensi (*competency gap analysis*),
- d. Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (*work load analysis*), khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan Kemenko PMK,
- e. Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non-gelar)
- f. Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (*succession planning*),
- g. Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi Kemenko PMK,
- h. Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (*Human Resource Information System*) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019.

2. Untuk mencapai sasaran strategis, maka Kemenko PMK perlu membangun standar kompetensi jabatan bagi seluruh jabatan, membangun perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan,

3. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam renstra 2015-2019, maka Kemenko PMK memerlukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan sasaran strategi kemenko PMK,
4. Perlunya penyempurnaan kebijakan dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif SDM yang menggunakan kemampuan Iptek dan dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal Kemenko PMK.

### 3.4.3 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, Kemenko PMK membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi Kemenko PMK sebagai berikut:

1. Terkait dengan perubahan nomenklatur dari Kemenko Kesra ke Kemenko PMK, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani restrukturisasi organisasi dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan struktur organisasi dan tata kerja, manajemen perubahan, dan pengelolaan restrukturisasi organisasi. Hal ini terkait juga dengan perubahan tugas dan fungsi seiring adanya perubahan K/L di bawah Kemenko PMK, maka diperlukan penyusunan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi yang spesifik,
2. Dalam rangka membangun pegawai Kemenko PMK yang profesional dan berintegritas, maka Kemenko PMK perlu mengoptimalkan integrasi dan sinergi penguatan fungsi yang mengembangkan SDM aparatur dan sistem pengelolaan SDM aparatur secara komprehensif dan terintegrasi.
3. Penataan tuis yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih,
4. Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas restrukturisasi organisasi dan tata kerja Kemenko PMK dengan Visi dan Misi Kemenko PMK yang diterjemahkan dalam berbagai tujuan dan sasaran strategis,
5. Perlunya kajian pembentukan Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap deputi, baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan. ✍



**BAB**

# 4

3

9

13

5

## **BAB 4** TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 *TARGET KINERJA*

4.2 *KERANGKA PENDANAAN*







## 4.1 Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut.

### 4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015–2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK dalam kurun waktu tersebut. Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK 2015–2019 disertai target kinerjanya diuraikan pada **Lampiran 5**.

### 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015–2019, Kemenko PMK akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik seperti telah dipaparkan pada Bab III.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut, disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan.

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko PMK dalam kurun waktu 2015–2019 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko PMK. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko PMK (seperti disajikan pada **Lampiran 7**).



**BAB**

# 5

**3**

**9**

**13**

**5**

**BAB 5 PENUTUP**





## KESIMPULAN

**Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2015-2019, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019.** Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Renstra Kemenko PMK mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Kemenko PMK sesuai Perpres 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Kemenko PMK telah mencanangkan visi untuk periode 2015–2019, yaitu: ***“Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong”***. Untuk dapat mewujudkan visi ini, Kemenko PMK telah merumuskan 4 pernyataan misi, yaitu: (1) Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; (2) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; (3) Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas; (4) Meningkatkan Kapasitas

kelembagaan Kemenko PMK. Visi sebagaimana diuraikan di atas, mengacu dan selaras dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2015–2019. Penetapan Visi dan Misi Renstra Kemenko PMK Tahun 2015–2019 tersebut didasarkan pada ketentuan penyusunan Renstra sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015–2019.

Dengan demikian Kemenko PMK yang memiliki bisnis utama koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang PMK, akan melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015–2019. Penyelenggaraan pelaksanaan bisnis utama tersebut dapat diindikasikan pencapaiannya melalui 3 mantap yaitu: mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap kegotongroyongan.

## ARAHAN PIMPINAN DAN PELAKSANAAN RENSTRA

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko PMK demikian luas dan melibatkan banyak K/L. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan PMK, luasnya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan non fisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antar waktu, serta keterkaitan antar wilayah. Untuk itu Kemenko PMK perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat

berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda pembangunan (Nawacita) maupun sub agenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi yang diamanatkan kepada Kemenko PMK dalam RPJMN 2015-2019, maka Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar 5 (lima) fokus koordinasi program & kegiatan dalam agenda kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Lima fokus koordinasi tersebut adalah:

1. Selaras Basis Data.
2. Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar.
3. Pembangunan Manusia Berkarakter.
4. Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pembangunan Desa Semesta.

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis Kemenko PMK untuk periode 2015–2019, yakni:

1. Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Meningkatnya kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia.
3. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kemenko PMK dalam rangka mewujudkan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, selama ini memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu: 1) Koordinasi kebijakan dan regulasi, terkait dengan tugas dan fungsi generik K/L di bawah koordinasi Kemenko Kesra; 2) Koordinasi permasalahan yang aktual dan *urgent*; dan 3) Koordinasi program/kegiatan yang bersifat terobosan dan percepatan.

## MEKANISME EVALUASI ATAS RENSTRA

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan Renstra 2015–2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenko PMK. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level Kemenko PMK merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu dalam Renstra Kemenko PMK 2015–2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015–2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko PMK 2015-2019 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kemenko PMK. Renstra dan Rencana Kerja Kemenko PMK inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam 5 fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenko PMK. Melalui mekanisme tersebut, seluruh insan Kemenko

PMK harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Kemenko PMK optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti seluruh jajaran Kemenko PMK kepada nusa dan bangsa.





3

9

13

5

## LAMPIRAN-LAMPIRAN





## Lampiran 1 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.1 Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	<b>SS.1.</b> Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. <b>SS.2.</b> Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Peningkatan peran koordinasi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan PMK.  Peningkatan peran pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	a. Meningkatkan mutu komunikasi kelembagaan b. Meningkatkan keterlibatan K/L pada 3P PMK.  a. Meningkatkan keterlibatan K/L pada pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L b. Meningkatkan kualitas pengendalian yang baku dan terstandarisasi.
T.2 Meningkatnya kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.	<b>SS.3.</b> Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.  <b>SS.4.</b> Meningkatnya kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia.  <b>SS.5.</b> Meningkatnya kemantapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia.	Peningkatan pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat  Peningkatan kesadaran peran dan keberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda.  Penguatan kesetiakawanan sosial dan kebudayaan	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pangan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan & pelayanan sosial b. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan administrasi kependudukan.  a. Meningkatkan kesadaran & partisipasi masyarakat memberdayakan ibu dan keluarga b. Meningkatkan keberdayaan & peran perempuan perempuan c. Meningkatkan keberdayaan dan peran generasi muda.  a. Memperkuat kesetiakawanan dan peran kelembagaan sosial b. Meningkatkan partisipasi dan penguatan kebudayaan melalui peran serta kelembagaan / masyarakat dalam penemuan dan Pemantauan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<p><b>T.3</b> Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</p>	<p><b>SS.6.</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK.</p> <p><b>SS.7.</b> Meningkatkan Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK</p> <p><b>SS.8.</b> Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kementerian PMK</p>	<p>Penguatan Sistem Manajemen SDM yang memfasilitasi pencapaian kompetensi, peran, dan kinerja dalam organisasi.</p> <p>Penerapan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan sumberdaya organisasi.</p> <p>Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK</p>	<p>Memperkuat sistem manajemen Pengembangan SDM aparatur</p> <p>a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memudahkan dan mendukung pencapaian kinerja lembaga dan pegawai b. Memperkuat sistem informasi Manajemen c. Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran c. Memperkuat sistem pengawasan internal.</p>

## Lampiran 2 Matriks Program dan Kegiatan Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1. Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Peningkatan peran koordinasi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan PMK.	a. Meningkatkan mutu komunikasi kelembagaan b. Meningkatkan keterlibatan K/L pada 3P PMK	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.
T.2. Meningkatnya Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.2. Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Peningkatan peran pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	a. Meningkatkan keterlibatan K/L pada pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L b. Meningkatkan kualitas pengendalian yang baku dan terstandarisasi	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.
T.2. Meningkatnya Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.3. Meningkatnya kemandapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Peningkatan pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pangan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan & pelayanan sosial b. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan administrasi kependudukan.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.3. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS.4. Meningkatnya kemandirian pemberdayaan masyarakat Indonesia.	Peningkatan kesadaran peran dan keberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda.	<p>a. Meningkatkan kesadaran &amp; partisipasi masyarakat memberdayakan ibu dan keluarga</p> <p>b. Meningkatkan keberdayaan &amp; peran perempuan</p> <p>c. Meningkatkan keberdayaan dan peran generasi muda.</p>	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.
	SS.5. Meningkatnya kemandirian kegotongroyongan masyarakat Indonesia	Penguatan kesetia-kawanan sosial dan kebudayaan	<p>a. Memperkuat kesetiakawanan dan peran kelembagaan sosial</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi dan penguatan kebudayaan melalui peran serta kelembagaan / masyarakat dalam penemuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p>	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.
T.3. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS.6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK	Penguatan Sistem Manajemen SDM yang memfasilitasi pencapaian kompetensi, peran, dan kinerja dalam organisasi	Memperkuat Sistem Manajemen Pengembangan SDM Aparatur	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan di Biro Umum</li> <li>- Kegiatan di Sekretariat Korpri</li> </ul>
	SS.7. Meningkatnya Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK.	Penerapan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan sumberdaya organisasi.	<p>a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memudahkan dan mendukung pencapaian kinerja lembaga dan pegawai</p> <p>b. Memperkuat sistem informasi Manajemen</p> <p>c. Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik .</p>	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan di Biro Umum</li> <li>- Kegiatan di Biro Perencanaan dan KLN</li> <li>- Kegiatan di Biro Informasi dan Persidangan</li> <li>- Kegiatan di Inspektorat</li> <li>- Kegiatan di Biro Informasi dan Persidangan.</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.8. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kementerian PMK.	Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kementerian PMK.	a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran c. Memperkuat sistem pengawasan internal.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	- Kegiatan di Biro Perencanaan dan KLN - Kegiatan di Inspektorat.

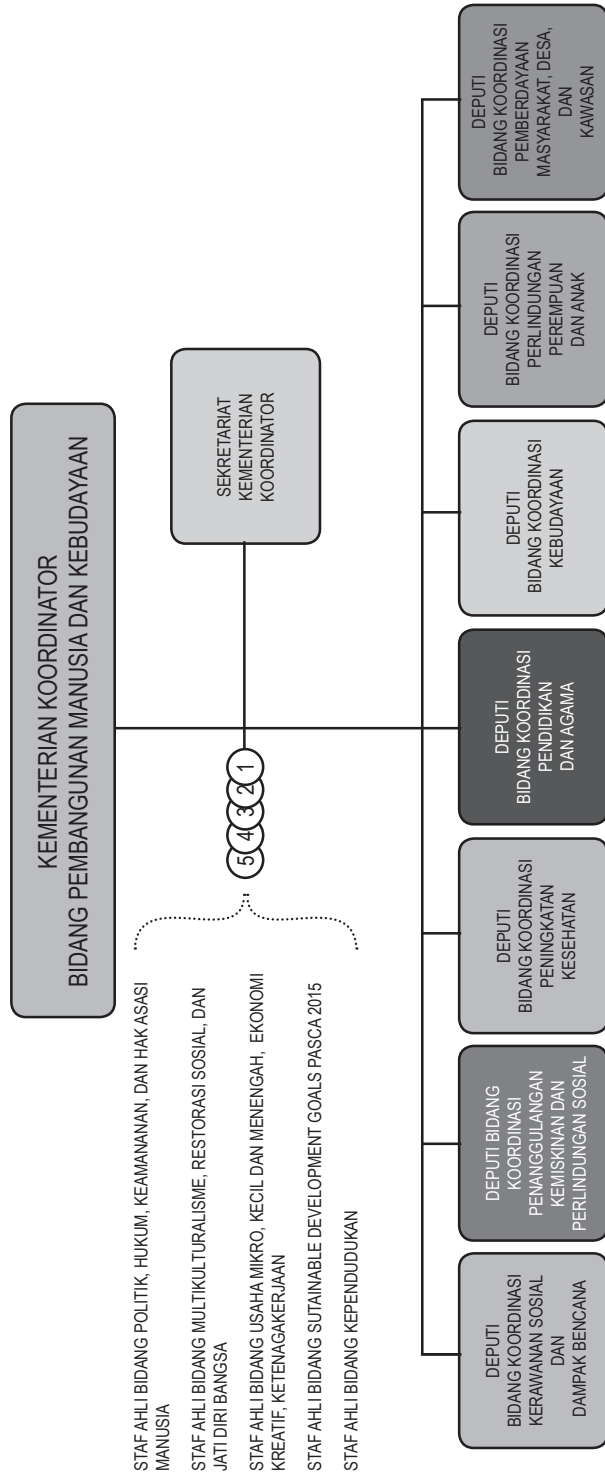
## Lampiran 3 Kerangka Regulasi

No.	Isu Strategis	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Dinamika interaksi sosial dan percepatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berkorelasi dengan problem sosial	Regulasi yang mengatur kerawanan sosial dan dampak bencana.	Regulasi mengenai deteksi dini terkait dengan kerawanan sosial Regulasi mengenai penanganan komprehensif dampak bencana dan partisipasi masyarakat.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015
2.	Pemantauan pelaksanaan Kebijakan Kemenko PMK	Perlu nya pemantauan kinerja K/L atas pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK.	Regulasi yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kemenko PMK oleh K/L.	Kemenko PMK	K/L	2015
3.	Pengembangan kebijakan Pembangunan Manusia	Mengembangkan dan menyeraskan kebijakan pembangunan manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran	Rekomendasi kebijakan mengenai sosialisasi SUSN Rekomendasi kebijakan mengenai pengurangan pengangguran.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015
4.	Peningkatan kesejahteraan nasional	Perlu nya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.	Penataan regulasi yang mendukung pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Beberapa regulasi terkait: UU No. 4/1979 Kesejahteraan anak, UU Nomor 3/1979 Peradilan untuk cacat, UU Nomor 4/1997 Kesejahteraan penyandang cacat, UU Nomor 13/1998 Kesejahteraan Lansia, UU Nomor 23/2002 Perlindungan anak, UU Nomor 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 21/2007 Penghapusan perdagangan manusia, UU Nomor 11/2009 Kesejahteraan sosial, UU Nomor 13/2011 Penanganan Fakir Miskin, UU Nomor 19/2011 Ratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 24/2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.	Kemenko PMK	K/L Terkait	2015



Lampiran 4 Kerangka Kelembagaan

**STRUKTUR ORGANISASI  
BERDASARKAN PERPRES 9 TAHUN 2015**



## Lampiran 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS				
			2015	2016	2017	2018	2019
T.1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1. Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Indeks kepuasan Stakeholder (K/L terkait) atas efektivitas dan efisiensi sinkronisasi dan koordinasi	3,8	3,9	4	4,1	4,2
		Kategori optimalitas realisasi Koordinasi & Sinkronisasi	70	75	80	85	90
T.2. Meningkatnya Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan	SS2. Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Indeks kepuasan Stakeholder atas efektivitas penggunaan metode/tools sebagai pengukuran kinerja K/L	3,8	3,9	4	4,1	4,2
		Kategori optimalitas realisasi penggunaan metode/tools	70	75	80	85	90
T.2. Meningkatnya Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan	SS.3. Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Tingkat Kemantapan Pelayanan	-0,14	-0,10	-0,06	-0,02	0,00
		Indeks Pembangunan Manusia	69,4 (metode baru)	-	-	-	76,3 (metode lama)
		Indeks Kesejahteraan Rakyat	53,4	-	--	--	60,2

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS				
			2015	2016	2017	2018	2019
T.3. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS.4. Meningkatnya kemandapan pemberdayaan masyarakat Indonesia.	Tingkat Kemandapan Pemberdayaan	-0,14	-0,10	-0,06	-0,02	0,00
		SS.5. Meningkatnya kemandapan kegotong-royongan masyarakat Indonesia	-0,14	-0,10	-0,06	-0,02	0,00
	SS.6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK.	Tingkat Kompetensi SDM	80%	82 %	85%	87%	90%
		SS.7. Meningkatnya Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK.	-0,14	-0,10	-0,06	-0,02	0,00
	SS.8. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK.	Tingkat Kepuasan terhadap Manajemen Sistem Informasi	70	75	80	90	100
		Persentase Realisasi anggaran	90	90	90	90	90
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Lampiran 6 Matriks Rencana Tindak K/L  
Kementerian/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang PMK

Kode	KL	Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab
						Rencana 2015	2016	2017	2018	
036	01	-	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian koordinator Bidang PMK	-	-	-	-	-	-
036	01	-	-	-	Persentase tersosialisasinya kebijakan/ kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui media	100%	100%	100%	100%	100%
036	01	-	-	-	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok
036	01	-	-	-	Persentase Pengelolaan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
036	01	-	-	-	Persentase terpenuhinya sarpras mendukung pelaksanaan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
036	01	-	-	-	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	207	207	207	207	207
036	01	-	-	-	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok
036	01	-	-	-	Jumlah kajian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
-	-	2530	Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab	
				Rencana 2015	2016	2017	2018		2019
-	-	Terwujudnya bahan persidangan, pencatatan persidangan dan pelaporan hasil persidangan yang cepat dan menyeluruh	Jumlah bahan dan hasil persidangan yang dicapai dengan lengkap dan menyeluruh	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	Kepala Biro Infomasi dan persidangan
-	-	Tersosialisasi dan terdokumentasinya kebijakan/ kegiatan di berbagai media	Jumlah sosialisasi kebijakan/kegiatan Kemento PMK di media cetak	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	-
-	-	Terwujudnya dokumen hukum, perangkat organisasi dan tata laksana dengan tepat waktu	Jumlah dokumen kebijakan/kegiatan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-
-	-	-	Jumlah dokumen hukum, perangkat organisasi, dan tata laksana dengan tepat waktu	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	-
-	-	-	Jumlah dokumen bidang hukum	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	-
-	-	Meningkatnya pengelola data dan sistem informasi di bidang PMK	Pelayanan sistem pengelolaan data dan informasi di Kemento PMK	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2531	Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi Kln	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	Kepala Biro Perencanaan dan KLN
-	-	-	Tersedianya dokumen peningkatan perencanaan bidang PMK	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	-
-	-	Meningkatnya monitoring dan evaluasi di lingkungan kemento PMK	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PMK	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	-

KL	Program	Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab	
						Rencana 2015	2016	2017	2018		2019
-	-	-	-	-	Tersedianya dokumen pelaporan bidang PMK	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	-
-	-	-	-	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kerjasama luar negeri	Tersedianya dokumen perjanjian/ kerjasama internasional	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-
-	-	-	-	-	Tersedianya Jumlah dokumen peningkatan kerjasama LN	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	-
-	-	2532	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	Kepala Biro Umum
-	-	-	-	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Kemenko PMK	Jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan kompetensi	207 Pegawai	207 Pegawai	207 Pegawai	207 Pegawai	207 Pegawai	-
-	-	-	-	Terselenggaranya layanan perkantoran	Dukungan layanan perkantoran , ketatausahaan, protokol dan kurjungan pimpinan serta pelaporan keuangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	-
-	-	-	-	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan kearsipan yang baik	Jumlah pengelolaan administrasi dan kearsipan	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	-
-	-	2533	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK	-	-	-	-	-	-	-	Inspektur
-	-	-	-	Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja kemenko PMK	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	-

KL	Program	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab	
						Rencana 2015	2016	2017	2018		2019
-	-	-	-	-	Tersedianya laporan pengawasan atas pelaksanaan anggaran	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	-
-	-	-	-	Terciptanya inspektorat yang profesional dan handal mendukung terlaksananya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kementerian PMK	Jumlah auditor yang kompeten dan bersertifikat sesuai jenjang jabatan dan keahlian	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	-
-	-	2535	Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	Siar Ahli
-	-	-	-	Tersusunnya kajian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang PMK	9 dok kajian	9 dok kajian	9 dok kajian	9 dok kajian	9 dok kajian	-
-	-	2567	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Biro Umum
-	-	-	-	Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran mendukung tugas dan fungsi Kemenko PMK	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	-
-	-	-	-	-	Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-
-	-	-	-	-	Tersedianya kendaraan dinas pendukung tupoksi	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	-
036	06	-	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-

KL	Program	Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab	
						Rencana 2015	2016	2017	2018		2019
-	-	-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%	-
-	-	-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%	-
-	-	-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Peningkatan Kesehatan yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%	-
-	-	-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Agama yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%	-
-	-	-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Kebudayaan yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%	-
-	-	-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%	-
-	-	-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, desa dan Kawasan yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%	-
-	-	2536	Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Penanganan Pasca Bencana
-	-	-	-	Terstusumnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Penanganan Pasca bencana	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Penanganan Pasca bencana	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-



KL	Program	Kode Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Rencana 2015	Target				Penanggung jawab
							Praktiraan Maju				
							2016	2017	2018	2019	
-	-	2537	Koordinasi kebijakan pengurangan resiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pengurangan Resiko Bencana
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pengurangan Resiko Bencana	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kerawanan sosial dan Dampak Bencana	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Kerawanan sosial dan Dampak Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
-	-	2538	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2539	Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Penulisan Agama dan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan

KL	Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Rencana 2015	Target				Penanggung jawab
							2016	2017	2018	2019	
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-	
-	-	2540	Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana	-	-	-	-	-	-	Asdep Tanggap Cepat Bencana	
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Tanggap Cepat Bencana	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Tanggap Cepat Bencana	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-	
-	-	2541	Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	-	Asdep Jaminan Sosial	
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang jaminan sosial	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Jaminan Sosial	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-	
-	-	2542	Koordinasi kebijakan warisan budaya	-	-	-	-	-	-	Asdep Warisan Budaya	
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Warisan Budaya	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Warisan Budaya	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-	
-	-	-	Terselenggaranya Kegiatan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)	<i>Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPKI</i>	1 dokumen	-	-	-	-	-	
-	-	-	Tersosialisasinya kegiatan revolusi mental kepada Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental	1 dokumen	-	-	-	-	-	

KL	Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab	
						Rencana 2015	2016	2017	2018		2019
-	-	2543	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	-	Terselenggaranya kegiatan Bhakti Kesra Nusantara	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bhakti Kesra Nusantara	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
-	-	2544	Sekretariat koordinasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemberdayaan kawasan perdesaan
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, Pembangunan desa dan kawasan perdesaan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2545	Koordinasi Kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah usulan Rekomendasi kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-

KL	Program	Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Rencana 2015	Target				Penanggung jawab
							2016	2017	2018	2019	
-	-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
-	-	2546	Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Kependudukan dan KB
-	-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang kependudukan dan KB	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang kependudukan dan KB	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2547	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemberdayaan perempuan
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2548	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemberdayaan kawasan perdesaan
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-

Kode	Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab	
					Rencana 2015	2016	2017	2018		2019
-	-	Koordinasi kebijakan Kompensasi Sosial	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Kompensasi Sosial
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Kompensasi Sosial.Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Kompensasi Sosial.Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Kompensasi Sosial.Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Kompensasi Sosial	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Kompensasi Sosial	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	Asdep Kompensasi Sosial
-	-	Koordinasi Kebijakan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Konflik Sosial
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Konflik Sosial	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Konflik Sosial	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	Koordinasi Kebijakan Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemenuhan hak dan Perlindungan Perempuan
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-

Kode	KL Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Rencana 2015	Target				Penanggung jawab
							2016	2017	2018	2019	
-	-	2552	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Kebijakan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Peningkatan kesehatan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-
-	-	2553	Koordinasi kebijakan keolahragaan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Keolahragaan
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang keolahragaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang keolahragaan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2554	Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Nilai dan Kreativitas Budaya
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang nilai dan kreativitas budayaTersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang nilai dan kreativitas budayaTersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang nilai dan kreativitas budaya	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang nilai dan kreativitas budaya	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	-	Terselenggaranya Kegiatan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPKI	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-

KL	Program	Kode Program Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Rencana 2015	Target				Penanggung jawab
							2016	2017	2018	2019	
-	-	-	-	Tersosialisasinya kegiatan revolusi mental kepada Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
-	-	-	-	Terselenggaranya kegiatan Sail	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sail	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
-	-	2555	Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pelayanan Kesehatan
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pelayanan Kesehatan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2556	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Disabilitas dan lanjut usia	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2557	Koordinasi Kebijakan Kepemudaan	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Kepemudaan
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang kepemudaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang kepemudaan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kebudayaan	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Kebudayaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-

KL	Program	Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Rencana 2015	Target				Penanggung jawab
							2016	2017	2018	2019	
-	-	2558	Koordinasi kebijakan PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan MasyarakatTersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan MasyarakatTersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-	Asdep Paud, Dikdas dan Pendidikan Masyarakat
-	-	2559	Koordinasi kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan BekerjaTersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-	Asdep Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan BekerjaTersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-	-
-	-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	-
-	-	2560	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan desa	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemberdayaan Desa



KL	Program	Kode Program	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Rencana 2015	Target			Penanggung jawab
							2016	2017	2018	
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibiidang Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan desa.Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan desa	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2561	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemberdayaan masyarakat
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan MasyarakatTersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-
-	-	2562	Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit	-	-	-	-	-	-	Asdep Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibiidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	-	-	Terselenggaranya layanan operasional sekretariat Zoonosis	Layanan operasional sekretariat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-
-	-	2563	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	Asdep Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
-	-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	1 usulan rekomendasi kebijakan	1 usulan rekomendasi kebijakan	1 usulan rekomendasi kebijakan	1 usulan rekomendasi kebijakan	-

KL	Program	Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab
						Rencana 2015	2016	2017	2018	
-	-	-	-	Tersusunnya dokumen perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah dokumen perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	1 dok perencanaan	1 dok perencanaan	1 dok perencanaan	1 dok perencanaan	-
-	-	-	-	Tersusunnya dokumen laporan nasional penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah dokumen laporan nasional penanggulangan HIV/AIDS	2 dok laporan	2 dok laporan	2 dok laporan	2 dok laporan	-
-	-	-	-	Tersusunnya laporan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitas SDM	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
-	-	-	-	Tersusunnya dokumen laporan penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS	Jumlah dokumen laporan penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-
-	-	-	-	Pelayanan Kesekretariatan	Layanan Kesekretariatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-
-	-	-	-	Tersedianya alat pengolahan data pendukung tupoksi	Jumlah paket pengolahan data dan informasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-
-	-	2564	Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak	-	-	-	-	-	-	Asdep Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang Pemenuhan hak dan perlindungan Anak	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan anak	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-
-	-	2565	Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	Asdep Penanganan Kemiskinan
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Kemiskinan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-

KL	Program	Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab
						Rencana 2015	2016	2017	2018	
-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Peninggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Peninggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-
-	-	2566	Koordinasi penanganan masalah-masalah strategis bidang PMK	-	-	-	-	-	-	Kepala Biro Perencanaan dan KLN
-	-	-	Tersusunnya Laporan hasil koordinasi masalah strategis bidang PMK	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi masalah strategis bidang PMK	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	-
-	-	2568	Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN)	-	-	-	-	-	-	Sekretaris DJSN
-	-	-	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Program jaminan Sosial Secara Terpadu	Tersedianya Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Jaminan Kesehatan Nasional	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-
-	-	-	-	Tersedianya Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-
-	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Terpadu SJSN bidang Kesehatan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	-
-	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Terpadu SJSN bidang Ketenaga Kerjaan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	-

KL	Program	Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Penanggung jawab	
						Rencana 2015	2016	2017	2018		2019
-	-	-	-	Tersusunnya Perangkat hukum pendukung implementasi SJSN	Jumlah draft peraturan pelaksanaan SJSN	6 dok	6 dok	6 dok	4 dok	4 dok	-
-	-	-	-	Tersusunnya Studi dan Kajian di Bidang Jaminan Sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN	Jumlah dokumen Kajian kebijakan SJSN	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	-
-	-	-	-	Terlaksananya sosialisasi SJSN	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, pameran, forum komunikasi dan kerjasama	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	-
-	-	-	Koordinasi kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	-	-	-	-	-	-	-	Asdep Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan abidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	2 usulan rekomendasi kebijakan	-

*catatan : merupakan capaian minimum akan dijabarkan pada renstra ke depannya*

## ampiran 7 Kerangka Pendanaan

### Kementerian/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang PMK

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)			
				Rencana 2015	2016	2017	2018
036	01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemerkota PMK	Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian koordinator Bidang PMK	-	142,916.0	140,387.0	146,588.0	147,742.0
036	01 -	-	Persentase tersosialisasinya kebijakan/ kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui media	100%	100%	100%	100%
036	01 -	-	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok
036	01 -	-	Persentase Pengelolaan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
036	01 -	-	Persentase terpenuhinya sarpras mendukung pelaksanaan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%
036	01 -	-	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	207	207	207	207
036	01 -	-	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok

Kode		Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
					Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
KL	Program	Kegiatan							
036	-	01	-	Jumlah kajian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
-	-	2530	Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	-	6,602.0	7,622.0	7,940.0	7,950.0	
-	-	-	-	Terwujudnya bahan persidangan, pencatatan persidangan dan pelaporan hasil persidangan yang cepat dan menyeluruh	908.0	884.0	983.0	1,283.0	1,283.0
-	-	-	-	Tersosialisasi dan terdokumentasinya kebijakan/ kegiatan di berbagai media	3,950.5	3,802.0	4,350.9	4,350.9	4,350.9
-	-	-	-	Terwujudnya dokumen hukum, perangkat organisasi dan tatalaksana dengan tepat waktu	150.2	235.6	235.6	235.6	235.6
-	-	-	-	Jumlah dokumen hukum, perangkat organisasi, dan tata laksana dengan tepat waktu	684.3	818.0	935.0	953.0	953.0
-	-	-	-	Jumlah dokumen bidang hukum	116.5	117.0	117.0	117.0	117.0
-	-	-	-	Meningkatnya pengelola data dan system informasi di bidang PMK	792.5	900.3	1,000.5	1,000.5	1,000.5
-	-	2531	Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi Kin	-	8,293.00	6,478.00	4,744.00	4,844.00	4,844.00

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)					
				Rencana 2015	2016	2017	2018	2019	
-	-	-	-	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran	2.609.0	2.000.0	2.282.0	2.282.0	2.282.0
-	-	-	-	Tersedianya dokumen peningkatan perencanaan bidang PMK	3.731.8	300.0	300.0	300.0	300.0
-	-	Meningkatnya monitoring dan evaluasi di lingkungan kementerian PMK	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan PMK	1,074.2	1,600.0	900.0	900.0	1,000.0	1,000.0
-	-	-	Tersedianya dokumen pelaporan bidang PMK	525.5	370.0	362.0	362.0	362.0	362.0
-	-	Terdapatnya peningkatan dan pengembangan kerjasama luar negeri	Tersedianya dokumen perjanjian/ kerjasama internasional	217.0	280.0	200.0	200.0	200.0	200.0
-	-	-	Tersedianya Jumlah dokumen peningkatan kerjasama LN	1,413.9	1,100.0	700.0	700.0	700.0	700.0
-	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	-	-	94.835.2	104.831.5	110.427.0	115.342.0	115.342.0	115.342.0
-	-	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran	1,111.0	3,600.0	3,900.0	3,900.0	3,900.0	3,900.0
-	-	Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Kemenko PMK	Jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan kompetensi	2,215.1	4,957.0	5,157.0	5,457.0	5,457.0	5,457.0
-	-	Terselenggaranya layanan perkantoran	Dukungan layanan perkantoran, ketatausahaan, protokol dan kunjungan pimpinan serta pelaporan keuangan	90.693.0	92.574.5	97.370.0	101.985.0	101.985.0	101.985.0

Kode		Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
					Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan kearsipan yang baik	Jumlah pengelolaan administrasi dan kearsipan	815.0	3,700.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
-	-	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK	-	-	720.0	1,016.0	900.0	900.0	900.0
-	-	-	Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja kemenko PMK	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan	334.1	334.1	334.1	334.1	334.1
-	-	-	-	Tersedianya laporan pengawasan atas pelaksanaan anggaran	317.2	616.0	500.0	500.0	500.0
-	-	-	Terciptanya inspektorat yang profesional dan handal mendukung terlaksananya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kemenko PMK	Jumlah auditor yang kompeten dan bersertifikat sesuai jenjang jabatan dan keahlian	68.6	65.9	65.9	65.9	65.9
-	-	Koordinasi Kajian Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan	-	-	2,785.0	2,737.0	2,742.0	2,856.0	2,900.0
-	-	-	Tersusunnya kajian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang PMK	2,785.0	2,737.0	2,742.0	2,856.0	2,900.0
-	-	Penyelenggaraan Pembinaan Kopri Kemenko PMK	-	-	526.0	538.0	500.0	500.0	500.0
-	-	-	Terselenggaranya pembinaan kopri kemenko PMK	Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan pembinaan kopri	526.0	538.0	500.0	500.0	500.0



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
				Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	28,735.9	20,558.6	13,734.0	14,306.0	15,306.0
-	-	Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran mendukung tugas dan fungsi Kemenko PMK	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	17,016.6	14,463.0	8,934.0	9,506.0	10,506.0
-	-	-	Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran	8,830.7	3,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
-	-	-	Tersedianya kendaraan dinas pendukung tupoksi	2,888.7	3,095.6	3,800.0	3,800.0	3,800.0
036	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	-	302,339.0	269,321.3	377,351.0	393,951.0	403,651.0
-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%
-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Perangulungan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%
-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Peningkatan Kesehatan yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%
-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Agama yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	75%
-	-	-	Persentase (%) Kebijakan Bidang Kebudayaan yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%

Kode		Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
					Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	Presentase (%) Kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%
-	-	-	-	Presentase (%) Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, desa dan Kawasan yang dihasilkan	50%	50%	75%	75%	100%
-	2536	Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana	-	-	3,762.0	1,234.5	5,800.0	6,100.0	6,400.0
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Penanganan Pasca bencana	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Penanganan Pasca bencana	-	1,234.5	5,800.0	6,100.0	6,400.0
-	2537	Koordinasi kebijakan pengurangan resiko bencana	-	-	4,862.0	3,251.3	4,750.0	4,850.0	5,150.0
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pengurangan Resiko Bencana	-	2,501.3	4,000.0	4,100.0	4,400.0
-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kerawanan sosial dan Dampak Bencana	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di Bidang Kerawanan sosial dan Dampak Bencana	-	750.0	750.0	750.0	750.0
-	2538	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	-	-	1,280.0	1,084.0	2,200.0	2,300.0	2,400.0
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	-	1,084.0	2,200.0	2,300.0	2,400.0
-	2539	Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	-	-	1,515.0	1,311.9	3,400.0	3,600.0	3,700.0

Kode	Program	Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)			
						Rencana 2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan	1,311.9	3,400.0	3,600.0	3,700.0
-	-	2540	Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana	-	-	2,365.0	2,300.0	2,400.0	2,500.0
-	-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Tanggap Cepat Bencana	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Tanggap Cepat Bencana	1,988.5	2,300.0	2,400.0	2,500.0
-	-	2541	Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial	-	-	2,589.0	2,600.0	2,700.0	2,800.0
-	-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Jaminan sosial	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Jaminan Sosial	2,736.8	2,600.0	2,700.0	2,800.0
-	-	2542	Koordinasi kebijakan warisan budaya	-	-	134,689.0	1,800.0	1,900.0	1,900.0
-	-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan di bidang Warisan Budaya	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Warisan Budaya	2,939.1	1,800.0	1,900.0	1,900.0
-	-	-	-	Terselenggaranya Kegiatan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPKI	1,749.9	-	-	-
-	-	-	-	Tersosialisasinya kegiatan revolusi mental kepada Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental	130,000.0	-	-	-
-	-	2543	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	-	-	14,797.0	17,200.0	18,100.0	19,000.0
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan strategis dan khusus	2,797.0	4,200.0	4,100.0	4,000.0
-	-	-	-	Terselenggaranya kegiatan Bhakti Kesra Nusantara	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bhakti Kesra Nusantara	12,000.0	13,000.0	14,000.0	15,000.0

Kode		Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)					
					Rencana 2015	2016	2017	2018	2019	
-	-	Sekretariat Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	-	-	1,440.0	1,511.6	1,600.0	1,700.0	1,800.0	
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, Pembangunan desa dan kawasan perdesaan	-	1,511.6	1,600.0	1,700.0	1,800.0	
-	-	Koordinasi Kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1,900.0	2,420.3	2,550.0	2,650.0	2,950.0	
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah usulan Rekomendasi kebijakan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1,670.3	1,800.0	1,900.0	2,200.0	
-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Perlindungan perempuan dan anak	-	750.0	750.0	750.0	750.0	
-	-	Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB	-	-	1,834.0	1,705.7	1,700.0	1,800.0	1,900.0	
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang kependudukan dan KB	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang kependudukan dan KB	-	1,705.7	1,700.0	1,800.0	1,900.0	
-	-	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan	-	-	2,050.0	1,497.9	2,000.0	2,100.0	2,200.0	
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan	-	1,497.9	2,000.0	2,100.0	2,200.0	
-	-	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan	-	-	2,227.0	2,064.0	2,100.0	2,200.0	2,300.0	

Kode		Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
					Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan/tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan/tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan/tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan/tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan kawasan perdesaan	-	2.064,0	2.100,0	2.200,0	2.300,0
-	-	Koordinasi Kebijakan Kompensasi Sosial	-	-	4.923,0	4.674,5	4.900,0	5.000,0	5.200,0
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Kompensasi Sosial/tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Kompensasi Sosial/tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Kompensasi Sosial/tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Kompensasi Sosial	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Kompensasi Sosial	-	4.674,5	4.900,0	5.000,0	5.200,0
-	-	Koordinasi Kebijakan Konflik Sosial	-	-	4.223,0	3.977,3	4.400,0	4.600,0	4.800,0
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Konflik Sosial	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Konflik Sosial	-	3.977,3	4.400,0	4.600,0	4.800,0
-	-	Koordinasi Kebijakan Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan	-	-	8.900,0	1.795,7	9.300,0	9.700,0	10.200,0

Kode		Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
					Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
KL	Program	Kegiatan							
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan. Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan. Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan. Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.	1,795.7	9,300.0	9,700.0	10,200.0	
-	-	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	-	-	1,744.0	3,100.0	3,200.0	3,300.0	
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	-	1,512.5	2,450.0	2,550.0	
-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Peningkatan kesehatan	-	750.0	750.0	750.0	
-	-	2553	Koordinasi kebijakan keolahragaan	-	1,801.0	1,700.0	1,800.0	1,900.0	
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang keolahragaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang keolahragaan	-	1,598.8	1,800.0	1,900.0	
-	-	2554	Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	-	8,634.0	203,200.0	203,600.0	204,900.0	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
				Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang nilai dan kreativitas budaya Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang nilai dan kreativitas budaya Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang nilai dan kreativitas budaya	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang nilai dan kreativitas budaya	2,532.6	2,320.1	2,000.0	2,300.0	3,500.0
-	-	Terselenggaranya Kegiatan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPKI	-	1,749.8	1,200.0	1,300.0	1,400.0
-	-	Tersosialisasinya kegiatan revolusi mental kepada Masyarakat	Jumlah Laporan hasil sosialisasi & Komunikasi Publik Kegiatan Revolusi Mental	-	109,600.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0
-	-	Terselenggaranya kegiatan Sail	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sail	6,101.4	-	-	-	-
-	Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan	-	-	1,690.0	1,519.5	1,600.0	1,700.0	1,700.0
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pelayanan Kesehatan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan	-	1,519.5	1,600.0	1,700.0	1,700.0
-	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	-	-	1,708.0	1,726.5	1,500.0	1,500.0	1,500.0
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Disabilitas dan lanjut usia	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	-	1,726.5	1,500.0	1,500.0	1,500.0
-	Koordinasi Kebijakan Kepemudaan	-	-	1,305.0	1,879.5	2,200.0	2,200.0	2,200.0
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang kepemudaan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang kepemudaan	-	1,129.5	1,450.0	1,450.0	1,450.0
-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Kebudayaan	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Kebudayaan	-	750.0	750.0	750.0	750.0

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
				Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	Koordinasi Kebijakan PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	-	-	8,962.0	8,722.0	16,000.0	16,800.0	17,500.0
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan MasyarakatTersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan MasyarakatTersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan MasyarakatTersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat	-	8,722.0	16,000.0	16,800.0	17,500.0
-	Koordinasi kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	-	-	1,405.0	1,332.5	2,500.0	2,600.0	2,700.0
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan BekerjaTersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan BekerjaTersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan BekerjaTersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	-	1,182.5	1,750.0	1,850.0	1,950.0
-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Pendidikan dan Agama	-	750.0	750.0	750.0	750.0
-	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan desa	-	-	2,636.0	2,614.7	2,400.0	2,500.0	2,600.0



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
				Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan desa, jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan desa, jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan desa	-	2.614,7	2.400,0	2.500,0	2.600,0
-	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	-	-	2.402,0	2.970,8	1.950,0	2.050,0	2.150,0
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya Rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	2.220,8	1.200,0	1.300,0	1.400,0
-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan	-	750,0	750,0	750,0	750,0
-	Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit	-	-	5.718,0	5.789,6	7.700,0	8.400,0	8.700,0
-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.815,9	4.815,3	5.800,0	6.100,0	6.300,0
-	-	Terselenggaranya layanan operasional sekretariat Zoonosis	Layanan operasional sekretariat	1.902,1	974,3	1.900,0	2.300,0	2.400,0
-	Koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-

Kode		Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
					Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
KL	Program	Kegiatan							
-	-	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	-	-	19.000,0	19.000,0	3.301,0	3.301,0	3.301,0
-	-	-	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	114,2	180,0	80,0	80,0	80,0
-	-	-	Tersusunnya dokumen perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah dokumen perencanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	100,9	167,8	60,0	60,0	60,0
-	-	-	Tersusunnya dokumen laporan nasional penanggulangan HIV/AIDS	Jumlah dokumen laporan nasional penanggulangan HIV/AIDS	9.742,8	9.809,8	1.200,0	1.200,0	1.200,0
-	-	-	Tersusunnya laporan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitas SDM	3.142,2	3.209,2	400,0	400,0	400,0
-	-	-	Tersusunnya dokumen laporan penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS	Jumlah dokumen laporan penyebarluasan informasi tentang HIV/AIDS	2.713,0	2.509,0	750,0	750,0	750,0
-	-	-	Pelayanan Kesejahteraan	Layanan Kesejahteraan	2.713,5	2.509,0	500,0	500,0	500,0
-	-	-	Tersedianya alat pengolahan data pendukung tupoksi	Jumlah paket pengolahan data dan informasi	473,2	615,2	311,0	311,0	311,0
-	-	Koordinasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak	-	-	1.754,0	1.640,8	2.500,0	2.600,0	2.700,0
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pemenuhan hak dan perlindungan Anak	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan anak/Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemenuhan hak dan perlindungan anak	-	1.640,8	2.500,0	2.600,0	2.700,0
-	-	Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan	-	-	2.115,0	2.851,0	3.600,0	3.700,0	3.800,0

Kode		Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
					Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Penanganan Kemiskinan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	-	2,101.0	2,850.0	2,950.0	3,050.0
-	-	-	Tersusunnya dokumen Program dan administratif kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Jumlah Dokumen Program dan Administratif Kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	-	750.0	750.0	750.0	750.0
-	2566	Koordinasi penanganan masalah-masalah strategis bidang PMK	-	-	28,625.0	32,176.4	16,000.0	16,700.0	17,500.0
-	-	-	Tersusunnya Laporan hasil koordinasi masalah strategis bidang PMK	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi masalah strategis bidang PMK	32,176.4	32,176.4	16,000.0	16,700.0	17,500.0
-	2568	Penataan kelembagaan jaminan sosial (SJSN)	-	-	19,584.0	19,865.1	38,300.0	48,300.0	50,600.0
-	-	-	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial Secara Terpadu	Tersedianya Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Jaminan Kesehatan Nasional	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Tersedianya Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Terpadu SJSN bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Terpadu SJSN bidang Ketenaga Kerjaan	-	-	-	-	-
-	-	-	Tersusunnya Perangkat hukum pendukung implementasi SJSN	Jumlah draft t peraturan pelaksanaan SJSN	-	-	-	-	-

Kode	Program	Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Alokasi (Rp. Juta)				
						Rencana 2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	Tersusunnya Studi dan Kajian di Bidang Jaminan Sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN	Jumlah dokumen Kajian Kebijakan SJSN	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Terlaksananya sosialisasi SJSN	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, pameran, forum komunikasi dan kerjasama	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Tersenggaranya layanan perkantoran pendukung sekretariat	Jumlah bulan layanan umum pendukung tupoksi	-	-	-	-	-
-	-	5642	Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	-	-	-	1,155.0	1,200.0	1,300.0	1,400.0
-	-	-	-	Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dibidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK	-	1,155.0	1,200.0	1,300.0	1,400.0
-	-	-	TOTAL	-	-	444,836.1	412,237.3	517,738.0	540,539.0	551,393.0